

DR. TEDI PRIATNA, M.AG

# MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

*Internalisasi Nilai-nilai Pancasila  
dalam Sistem Pendidikan Nasional*



Penerbit : **CV. Insan Mandiri**

ISBN. 978-602-7755-63-5

# MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

DR. TEDI PRIATNA, M.AG

## MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

*Internalisasi Nilai-nilai Pancasila  
dalam Sistem Pendidikan Nasional*



Penerbit : CV. Insan Mandiri

ISBN. 978-602-7755-63-5

DR. TEDI PRIATNA, M.AG

ISBN. 978-602-7755-63-5



Penerbit : **CV. INSAN MANDIRI**

Dilarang memperbanyak dan mengedarkan sebagian apalagi seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, seperti dicetak, fotokopi, microfilm, CD-Rom, dan rekaman suara tanpa izin dari pemilik hak, kecuali untuk kepentingan penulisan buku atau artikel.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

**Judul Buku:**

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA**

(Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional)

**Penulis:**

Dr. Tedi Priatna, M.Ag.

**ISBN: 978-602-7755-63-5**

**Editor:**

Saca Suhendi, M.Ag.

**Tata Letak & Design Cover:**

Samsudin, ST

Cetakan Pertama : Mei 2018

**Penerbit & Percetakan:**

CV. Insan Mandiri

Jl. Cimuncang No. 14 Cibeunying Kidul

Bandung 40125 Telp/Fax. 022-7213958

e-mail: cv.insanmandiri\_14@yahoo.com

---

## Pengantar Penulis

Pancasila adalah dasar negara untuk tetap hidup dan berkembang dan merupakan "*common consensus*" filsafat bangsa dan ideologi negara. Masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan proaktif dalam usaha-usaha meng-artikulasikan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupannya. Pendidikan nasional harus didasarkan atas suatu kerangka filosofis yang bersumber pada filsafat negara, yakni Pancasila yang berfungsi sebagai sarana transformasi ilmu, social budaya, dan juga sebagai sarana mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya.

Nilai-nilai Pancasila merefleksikan paradigma pendidikan yang mampu menghadirkan alternatif pendidikan yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupannya terutama sebagai dasar dalam mengembangkan karakter bangsa. Yakni karakter berakhlak mulia, tangguh, kompetitif, beramal, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Pendidikan karakter harus dikembangkan di semua jalur dan satuan pendidikan, di sekolah, di keluarga dan juga di lingkungan.

Risalah di tangan Anda ini, mudah-mudahan menjadi bagian yang terpisahkan dari upaya menghadirkan Pancasila dalam wajah yang lebih akademis untuk pengembangan pendidikan di Indonesia, dalam rangka Membangun Karakter Bangsa melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. Keseluruhan bagian dari buku ini isinya merupakan khazanah yang signifikan untuk digunakan sebagai referensi intelektual dalam upaya merumuskan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. Banyak kekhilafan dan kekurangan dalam pembahasannya. Dengan kerendahan hati yang terdalam, semoga tanggapan dan kritikan yang disampaikan akan menjadi pemacu dan pemicu penulis untuk selalu belajar.

Kepada guru-guru penulis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pemikirannya mengilhami keseluruhan isi buku ini; dan semua pihak yang turut membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bantuan yang diberikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Terakhir, kepada yang tercinta Mah Entet, yang tersayang Ka' Dienan, Ka' Iyang dan De' Ipong yang begitu akrab dengan 'mimpi-mimpi' penulis, terima kasih atas pengertiannya. Semoga mereka tidak pernah bosan menemani dan memotivasi penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segala-nya, semoga karya ini bermanfaat.

Amien.

# Daftar Isi

Pengantar Penulis ~ i

Daftar Isi ~ iii

- Pendahuluan ~ 1
- Revitalisasi dan Reorientasi Pemahaman tentang Pancasila ~ 5
- Metodologi ~ 11
- Pancasila: Sejarah Kelahiran dan Pengertiannya ~ 15
- Pendidikan Karakter Nilai-nilai Pancasila ~ 23
- Refleksi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa Melalui Sistem Pendidikan Islam ~ 35
- Penerapan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan ~ 63
- Penutup ~ 69

Daftar Pustaka ~ 73

TEDI PRIATNA

*Membanqun Karakter Bangsa:*  
Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam  
Sistem Pendidikan Nasional

BANDUNG  
2018

*Membangun Karakter Bangsa:*

Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam  
Sistem Pendidikan Nasional

Penulis:  
Tedi Priatna

---

Setting & Lay Out :

---

Desain Sampul :

---

Cetakan I: April 2017

---

Penerbit:

---



## Pengantar Penulis

Pancasila adalah dasar negara untuk tetap hidup dan berkembang dan merupakan “*common consensus*” filsafat bangsa dan ideologi negara. Masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan proaktif dalam usaha-usaha mengartikulasikan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupannya. Pendidikan nasional harus didasarkan atas suatu kerangka filosofis yang bersumber pada filsafat negara, yakni Pancasila yang berfungsi sebagai sarana transformasi ilmu, social budaya, dan juga sebagai sarana mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya.

Nilai-nilai Pancasila merefleksikan paradigma pendidikan yang mampu menghadirkan alternatif pendidikan yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupannya terutama sebagai dasar dalam mengembangkan karakter bangsa. Yakni karakter berakhlak mulia, tangguh, kompetitif, beramal, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Pendidikan karakter harus dikembangkan di semua jalur dan satuan pendidikan, di sekolah, di keluarga dan juga di lingkungan.

Risalah di tangan Anda ini, mudah-mudahan menjadi bagian yang terpisahkan dari upaya menghadirkan Pancasila dalam wajah yang lebih akademis untuk pengembangan

pendidikan di Indonesia, dalam rangka Membangun Karakter Bangsa melalui Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. Keseluruhan bagian dari buku ini isinya merupakan khazanah yang signifikan untuk digunakan sebagai referensi intelektual dalam upaya merumuskan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan Nasional. Banyak kekhilafan dan kekurangan dalam pembahasannya. Dengan kerendahan hati yang terdalam, semoga tanggapan dan kritikan yang disampaikan akan menjadi pemacu dan pemicu penulis untuk selalu belajar.

Kepada guru-guru penulis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang pemikirannya mengilhami keseluruhan isi buku ini; dan semua pihak yang turut membantu, penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga bantuan yang diberikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Terakhir, kepada yang tercinta Mah Entet, yang tersayang Ka' Dienan, Ka' Iyang dan De' Ipong yang begitu akrab dengan 'mimpi-mimpi' penulis, terima kasih atas pengertiannya. Semoga mereka tidak pernah bosan menemani dan memotivasi penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segala-nya, semoga karya ini bermanfaat.

Amien.

# Daftar Isi

## Pengantar Penulis

- Pendahuluan /1
- Revitalisasi dan Reorientasi Pemahaman tentang Pancasila /4
- Metodologi /9
- Pancasila: Sejarah Kelahiran dan Pengertiannya /12
- Pendidikan Karakter Nilai-nilai Pancasila /18
- Refleksi Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa Melalui Sistem Pendidikan Islam /29
- Penerapan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan /54
- Penutup /58

## Daftar Pustaka

## Daftar Pustaka

- A. Ginting Munthe, *Islam dan Sosialisme Pancasila*, (Jakarta: Djurnal Publishing Company, t.t.)
- Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Kehidupan Beragama dalam Negara Pancasila*, Abdullah Sukarta, (ed.) (Jakarta: Depag RI, 1982)
- Anonimous, *The Essence and Characteristics of Pancasila Democracy*.  
<http://www.indon.dk/pancasila.htm>
- Armida S. Alisjahbana. *Pendidikan Nasional dan Pengembangan Karakter Bangsa*. Tangerang, 2010.
- Bohlin, Karen. *Building Character in School resource Guide*. California. Jossey Bass, 2001.
- Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis Evaluasi Pendidikan di Masa Kritis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Dasiman Budiansyah. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung. Widya Aksara Pers, 2010
- David. H. Elkin and Freddy Sweet. (2010). *How Do Character Education*.  
[http://www.goodcharacter.com/Article\\_4.html](http://www.goodcharacter.com/Article_4.html). Diunduh oleh Tedi Priatna, 5 Desember 2010
- Doni Kusuma. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik anak di Zaman Global*. Jakarta, Grasindo. 2010
- Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990)
- Hasan Langgulung, *Azaz-azaz Pendidikan Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1992) cet. Ke-2
- Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Ismaun, *Pembahasan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*, (Bandung: Yulianti, 1981)
- J. Riberu, "Pendidikan Agama dan Tata Nilai", dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) cet. I
- Jimmy Wales. [http://en.wikipedia.org/wiki/Character\\_education](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_education).  
Diunduh oleh Tedi Priatna, 5 Desember 2010
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2001), edisi V

- Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis (Apakah Pendidikan masih diperlukan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1992)
- Koya Kutty dengan Amin Rais pada kegiatan *the International Seminar on Kashmir and Palestine* yang diselenggarakan *Islamic Party of Malaysia* di Kota Bharu, Malaysia on July 25. *Muslimedia*, 15 Januari 1998.  
<http://www.muslimedia.com/archives/sea98/amien.htm>
- Kuntowijoyo, “Radikalisme Pancasila”, *Kompas*, (Jakarta), 20 Pebruari 2001
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono, (ed.) (Bandung: Mizan, 1991), cet. I
- Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), cet. IV
- Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960)
- Noor MS. Bakry, *Orientasi Pancasila* (Yogyakarta, Liberty, 1990) Cet. I
- Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), Cet, ke-7
- Nurcholish Madjid, “Islam di Indonesia dan Potensinya sebagai Sumber Subtansiasi Ideologi dan Etos Nasional”, Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994)
- Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1994), cet. VII
- Ricklefs, MC., *A History of Modern Indonesia*, terj. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992)
- Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. I
- Viva Yoga Mauladi, (ed.) “Pengantar Editor” dalam A. Dahlan Ranuwihardjo, *Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila*, (Jakarta: Intrans, 2002), cet. I
- Wayan Ardhana, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Malang: FIP-IKIP Malang, 1986)

# PENDAHULUAN

*... Pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis...*

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus menjiwai semua bidang pembangunan. Salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis, ideologis, normatif, historis maupun sosiokultural.

Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah,

baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparat, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun, di samping banyak kemajuan yang telah dicapai ternyata masih banyak masalah dan tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, termasuk kondisi karakter bangsa yang akhir-akhir ini mengalami pergeseran.

Karakter bangsa merupakan karakter yang harus dipertahankan bahkan dikembangkan sehingga menjadi satu karakter yang diikuti oleh semua orang di dunia. Terjadinya dekadensi moral, perkelahian, tawuran dikalangan pelajar, perang antar suku, perampokan, bahkan sampai tingkat perilaku yang bersifat sadis seperti pencabulan, pemerkosaan dan pembunuhan, itu semua sudah menjadi sarapan pagi kita disaat kita menonton televisi. Padahal kita telah mengetahui bahwa negara kita yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila sudah terkenal sebagai bangsa yang ramah, penuh dengan kedamaian, gotong royong. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan fakta yang kita temukan pada keseharian kita hari ini. Ini adalah sebuah

fenomena yang sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa ciri karakter dari bangsa kita telah hilang. Oleh karena itu perlu dikaji tentang bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam upaya membangun karakter bangsa pada peserta didik.



## REVITALISASI DAN REORIENTASI PEMAHAMAN TENTANG PANCASILA

*... Masyarakat dengan keanekaragamannya harus  
diberi kebebasan proaktif dalam usaha-usaha mengartikulasikan nilai-nilai  
Pancasila dan mengaktualisasikannya dalam kehidupannya...*

Merebaknya kesinisan masyarakat terhadap Pancasila akhir-akhir ini, dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat wajar. Betapa tidak, di bawah rezim Orde Baru, Pancasila telah digunakan sebagai instrumen politik yang demikian repressif, dan bukan diposisikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*). Akibatnya, kehadiran Pancasila tidak dirasakan sebagai kekuatan etis dan *value resources* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen politik rezim, pada waktu itu Pancasila telah ditafsirkan begitu monolitik yang membawa pada pemikiran tertutup dan mitologis. Apalagi rezim penguasa, sama sekali tidak menyediakan ruang publik untuk mengembangkan wacana dan pemikiran alternatif dan terbuka. Akibatnya sosialisasi Pancasila yang dijalankan cenderung indoktrinatif, irrasional, dan fatalis karena hanya mewakili subjektivisme kekuasaan. Tanpa disadari, keadaan seperti ini telah menyebabkan terjadinya “pembusukan” terhadap Pancasila melalui tangan kekuasaan.

Orde Baru telah menyelewengkan Pancasila secara substantif; cara yang inkorespondensi, dengan melakukan berbagai hal yang tidak sesuai antara ideologi dengan kenyataan. Misalnya saja, sila Keadilan Sosial diganti dengan kapitalisme, sila Kerakyatan dengan otoritarianisme, sila Persatuan diganti dengan

militerisme, dan sila Kemanusiaan dengan kekerasan politik. Hanya sila Ketuhanan yang tak tersentuh dari sisi substansinya. Memang ada rekayasa khutbah, tetapi hanya bersifat prosedural.<sup>1</sup>

Melihat kondisi Pancasila seperti itu, Harry J. Benda (1986) berpendapat bahwa Pancasila hanyalah obat bius bagi yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan Van Der Kroef (1996) secara sinis mengatakan bahwa Pancasila hanyalah ibarat tong kosong belaka (*a bowl without content*).<sup>2</sup> Yang menjadi pertanyaan, mengapa Pancasila tidak difungsikan sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) seperti tradisi pada awal kelahirannya?

Sebab pokoknya adalah: *pertama*, mental *attitude* para pemimpin dan penguasa yang tidak mempunyai integritas moral dalam mengelola pemerintahan sehingga penjabaran cita-cita luhur demi menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat telah diselewengkan untuk mempertahankan kekuasaan dan penimbunan kekayaan rezim. Kondisi ini menciptakan budaya politik *feodal-patronatif* beriringan dengan budaya birokrasi yang *koruptif-kolutif*. Atmosfir seperti ini akan menyebabkan hilangnya daya cipta bangsa dalam melakukan proses *national and character building*. Dalam hal ini Nurcholis Madjid mengemukakan:

Ideologi negara Pancasila sebagai bentuk konvergensi nasional dalam perangkat formal konstitusional, telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang republik. Tapi hal tersebut agaknya terbatas kepada kemampuannya untuk menjadi sumber legitimasi bagi usaha-usaha mempertahankan status quo. Bahkan, di tangan penguasa dan pejabat yang tidak kreatif, Pancasila sering berfungsi sebagai alat pengenalan diri yang dangkal, sebagai pemukul kelompok yang “tidak berkenan di hati”, .. secara demonstratif menunjukkan

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, “Radikalisme Pancasila”, *Kompas*, (Jakarta), 20 Pebruari 2001

<sup>2</sup> Viva Yoga Mauladi, (ed.) “Pengantar Editor” dalam A. Dahlan Ranuwihardjo, *Revolusi, Anti Imperialisme dan Pancasila*, (Jakarta: Intrans, 2002), cet. I, hlm. v

pola manipulasi terhadap Pancasila, bahkan dijadikan sebagai suatu *ideological weapon* untuk kepentingan sesaat.<sup>3</sup>

*Kedua*, para pemimpin dan elit penguasa, seringkali menjadi para penafsir Pancasila secara mistik. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara tidak diposisikan sebagai kesadaran makna (*sense of meaning*) dan landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melainkan sebagai sesuatu yang mempunyai kehidupan sendiri, sakral, dan lepas dari akar historis bangsa. Dengan kata lain, Pancasila seakan hadir dalam *locus* sosial yang kosong, mengawang-awang, dan tidak membumi.<sup>4</sup> Di sinilah kita melihat Pancasila sebagai ideologi seperti telah berubah menjadi semacam *delusi sosial* atau dalam bahasa Habermas sebagai suatu pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang membeku sehingga menjadi *delusi* atau kesadaran palsu yang merintang *praxis* sosial manusia dalam merealisasikan kebaikan, kebenaran, kebahagiaan dan kebebasannya.<sup>5</sup>

Kendati demikian, sampai sekarang ini Pancasila tetap menjadi dasar negara. Akar historis kelahiran Pancasila sebagai kesepakatan bangsa tampaknya sulit untuk dilangkahi, apalagi ditinggalkan hanya karena Pancasila dalam tahapan perkembangan implementasinya telah mencitrakan diri sedemikian buruk. Hal itu dimungkinkan karena kita memang sangat membutuhkan dasar negara. Tetapi kemudian yang menjadi persoalannya adalah masih mungkinkah menyajikan Pancasila dengan wajah yang seperti yang terlihat saat ini? Pada tataran inilah diperlukan revitalisasi dan reorientasi dalam memahami dan menghayati Pancasila.

Salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan untuk itu semua adalah mengubah model pendekatan dari pikiran

---

<sup>3</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1994), cet. VII, hlm.. 44-45

<sup>4</sup> Viva Yoga Mauladi, *Op. Cit.*, hlm. vi

<sup>5</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 191

monolitik, eksklusif dan mistik terhadap Pancasila menjadi demokratis, inklusif dan rasional. Meminjam bahasa Kuntowijoyo (1994), model pendekatan ini adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai ilmu, yang memakai sudut pandang ilmiah dan akademik. Hal ini dimungkinkan karena sifat ilmu yang terbuka, sehingga diharapkan akan terjadi dialog yang terbuka. Pendekatan ini diharapkan menghilangkan pola penafsiran lama, yang menafsirkan Pancasila dalam bahasa politisi dan birokrasi, sehingga pandangan yang disampaikan ke masyarakat ialah pandangan politik dan administratif.<sup>6</sup>

Selain itu, Kuntowijoyo juga menawarkan jalan alternatif yaitu “radikalisasi” Pancasila dengan cara: (1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara; (2) mengganti persepsi tentang Pancasila sebagai ilmu; (3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan, koherensi sila-sila dalam Pancasila, dan korespondensi dengan realitas sosial; dan (4) Pancasila yang semula melayani kepentingan vertikal kekuasaan menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal.<sup>7</sup>

Sebagai produk pikiran modern, Pancasila hendaknya diposisikan sebagai sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis. Jika demikian, watak dinamis Pancasila itu akan membuatnya sebagai ideologi terbuka, yakni sebagai perumusan formal. Kedudukan konstitusional Pancasila merupakan hal yang final, namun dalam pengembangan prinsip-prinsipnya tetap terbuka dan dinamis sehingga menjadi aktual dan relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa lain kecuali mesti dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mungkin dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (*once for all*).

Kemestian logis akibat deretan asumsi tersebut adalah bahwa masyarakat dengan keanekaragamannya harus diberi kebebasan

---

<sup>6</sup> Kuntowijoyo, *Op. Cit.*

<sup>7</sup> *Ibid*

mengambil bagian aktif dalam usaha-usaha menjabarkan nilai-nilai ideologi nasional itu serta mengaktualisasikannya dalam kehidupan masyarakat. Setiap usaha menghalanginya akan menjadi sumber malapetaka, tidak saja bagi negara dan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk, tetapi juga bagi ideologi nasional itu sendiri sebagai titik tolak pengembangan pola hidup bersama.<sup>8</sup> Diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan upaya mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan pengusutan lebih mendalam.<sup>9</sup>

Hal ini sangat mungkin dilakukan terutama untuk menghilangkan bahaya absolutisasi ideologi sebagai kesadaran palsu sehingga mengarah pada suasana kebebasan dan dinamisasi pemikiran alternatif yang terbuka. Dengan demikian, Pancasila diharapkan memiliki daya kemampuan ideologis untuk menyerap pengalaman-pengalaman empiris ke dalam sistemnya dan terus-menerus beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan baru melalui sebuah proses dialektik. Dengan cara itu, [mudah-mudahan] bagian ini bisa menghadirkan Pancasila dalam wahana kritik ideologi yang lebih bersifat akademis dan demokratis.

---

<sup>8</sup> Menurut Nurcholish Madjid, diilhami QS Ali 'Imran/3:64 bahwa posisi dan fungsi Pancasila merupakan titik temu (*common platform, kalimah sawa*) antara berbagai komunitas kemasyarakatan (*societal community*) dalam bangsa kita, terutama komunitas keagamaan. Dalam sejarah peradaban Islam, Pancasila sebagai produk bangsa Indonesia ini sering diidentikkan dengan Piagam Madinah di zaman Rasulullah SAW. Nurcholish Madjid, "Islam di Indonesia dan Potensinya sebagai Sumber Subtansiasi Ideologi dan Etos Nasional", Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 568-569, hlm. 577.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan, Op. Cit.*, hlm. 45

## METODOLOGI

*... Analisis kritis: mengkaji gagasan primer mengenai suatu "ruang lingkup permasalahan" yang dipercaya sebagai fokus penelitian melalui teknik pengumpulan data yang book survey atau library research.*

Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode "analitis kritis". Metode penelitian ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tentang objek tertentu. Objek kajian dalam metode ini adalah *gagasan* atau *ide* manusia yang terungkap dalam bentuk media cetak, baik berupa naskah primer atau naskah sekunder [sumber data primer dan sumber data sekunder]. Gagasan dalam naskah primer adalah sejumlah data mengenai masalah pokok penelitian, sedangkan gagasan sekunder adalah pembahasan dan kritik terhadap gagasan primer yang termuat dalam naskah.

Tujuan penelitian analitis kritis adalah mengkaji gagasan primer mengenai suatu "ruang lingkup permasalahan" yang dipercaya sebagai fokus penelitian. Adapun fokus penelitiannya adalah (a) mendeskripsikan, (b) membahas, dan (c) mengkritik gagasan primer yang selanjutnya (d) melakukan studi analitik dengan mengembangkan studi yang berupa perbandingan, hubungan, pengembangan model rasional, dan penelitian historis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama" dalam Mastuhu dan M. Deden

Penelitian terhadap “nilai” [dalam frase nilai-nilai Pancasila] mengidentikkan pengertian harga dan kualitas. Karena itu, jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan analisis data yang digunakan adalah analisis interpretatif-deduktif, yakni penafsiran berdasarkan kaidah normatif dan logis sebagai ciri khas dari filsafat [filsafat pendidikan].

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *book survey* atau *library research*. Teknik pengumpulan data dalam pembahasan ini adalah penelaahan naskah dan pengamatan realitas yang berdasarkan studi pustaka. Tahapan studi pustaka tersebut adalah: (a) menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian; (b) memilih isi bahan pustaka seperti menentukan topik dan tema; (c) menelaah isi bahan pustaka dengan klarifikasi konsep dan teori mengenai gagasan primer dan sekunder; dan selanjutnya (d) mengelompokkan hasil bacaan berdasarkan masalah dan tujuan pembahasan.<sup>11</sup>

Penelitian terhadap pemikiran [gagasan] merupakan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yakni suatu upaya kajian yang melihat bagaimana pemikiran tersebut terstruktur, bagaimana argumen logisnya dibangun, serta bagaimana seluruh dimensi itu dipaparkan secara analitis-kritis, untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang kerangka pemikiran itu secara menyeluruh dan mendasar.<sup>12</sup>

Setelah data terkumpul, penelitian melakukan analisis data dengan tahapan berikut:

---

Ridwan, (ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Baru: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*, (Jakarta: Pusjarlit dan Bandung: Nuansa, 1998), h. 41-61.

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *op. cit.*, h. 34-35

<sup>12</sup> Abdul Kodir, “Pemikiran Malik bin Nabi tentang Filsafat Sejarah” dalam Ringkasan Laporan Penelitian Peningkatan SDM-PPTA/IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung: Pusat Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1996, h. 5, t.d.

- a. Mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek penelitian.
- b. Membahas (menafsirkan) gagasan primer tersebut.
- c. Melakukan kritik.
- d. Melakukan studi analitik (perbandingan).
- e. Menyimpulkan hasil pembahasan sesuai dengan tujuan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Jujun S. Suriasumantri, *op. cit.*, h. 45-47.



## PANCASILA: SEJARAH KELAHIRAN DAN PENGERTIANNYA

*... Pancasila adalah dasar negara untuk tetap hidup dan berkembang dan merupakan "common consensus" filsafat bangsa dan ideologi negara...*

Secara historis, perumus Pancasila adalah bangsa Indonesia, dengan kronologi sebagai berikut: *Pertama*, Soekarno, Presiden RI I, menyatakan diri sebagai penggali Pancasila.<sup>14</sup> *Kedua*, rumusan Pancasila disusun oleh Panitia Sembilan, yakni: Soekarno, Mohammad Hatta, AA Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin, pada 22 Juni 1945, oleh Yamin dinamai 'Piagam Jakarta'.<sup>15</sup> *Ketiga*, rumusan Piagam Jakarta

---

<sup>14</sup> Pidato Soekarno di depan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945; lihat Ricklefs, MC., *A History of Modern Indonesia*, terj. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 313. Ada pandangan yang mengatakan bahwa 'pencipta' Pancasila ialah HOS Tjokroaminoto dengan alasan karena beliau adalah pendiri SI (Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam, berdiri 16 Oktober 1905) sebagai perintis yang telah membangkitkan kesadaran berbangsa, bertanah air, dan berbahasa Indonesia serta telah mempelopori pemberian lambang yang mempunyai pengaruh besar terhadap gerakan bangsa Indonesia selanjutnya (lambang banteng, padi dan kapas, serta tali yang menjadi rantai seperti pada perisai Garuda Pancasila)

<sup>15</sup> Bunyi Piagam Jakarta: (1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) (menurut dasar) kemanusiaan

diubah pada 18 Agustus 1945 oleh Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), Kasman Singodimejo (Muhammadiyah), Mohammad Hatta, dan Teuku Mohammad Hassan (wakil Sumatera). *Keempat*, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan ‘Pancasila’ sebagai landasan ideal (dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945).<sup>16</sup>

Dalam visi kebangsaan, Pancasila tidak dapat diidentikkan dengan seseorang secara personal, atau dianggap sebagai kreasi individual, bahkan kepada Soekarno Presiden Pertama RI

---

yang adil dan beradab; (3) persatuan Indonesia; (4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; (5) (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; lihat Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 267.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 29, 209, dan 266-267. Bahwa pencipta Pancasila adalah umat Islam, dan ‘pengorbanan terbesar’ umat Islam Indonesia adalah mencoret tujuh kata pada sila pertama Piagam Jakarta. Lihat Alamsjah Ratu Perwiranegara, *Kebudayaan Beragama dalam Negara Pancasila*, Abdullah Sukarta, (ed.) (Jakarta: Depag RI, 1982), hlm. 52. Pancasila adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia; sedangkan menurut Madjid, *Islam Kemodernan, Op. Cit.*, hl. 70-71: karena faktor intern Islam itu sendiri yang memiliki ‘daya tarik’ sehingga menjadi agama utama di Indonesia (kawasan Nusantara) yakni egalitarianisme (kesederajatan) dalam etika sosial-politik dan menjadi akses rumusan Pancasila; juga menurut Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono, (ed.) (Bandung: Mizan, 1991), cet. I, hlm. 317. Banyak pemikir Muslim Indonesia yang memasukkan nilai dan norma Islam ke dalam ilmu sosial melalui jalur Pancasila; cf. Munthe yang berhaluan ‘Islam-Kiri’, meruntukkan penemuan Pancasila sebagai berikut: (1) Piagam Jakarta; (2) kembali kepada UUD 1945 sebagai dasar Revolusi Nasional; (3) DPRGR dan DPRD-nya semua swatantra (otonom) I dan II; (4) MPRS-nya mensahkan GBHN; (5) DPA; (6) Depernas dan Bapekan; (7) Dekrit 5 Juli 1959; dan (8) Manipol-Usdek; Munthe menyebutnya sebagai ‘Historis Materialisme Paralelisme Pancasila’. Lihat A. Ginting Munthe, *Islam dan Sosialisme Pancasila*, (Jakarta: Djurnal Publishing Company, t.t.), hlm. 74.

sekalipun yang dianggap pencetus pertama.<sup>17</sup> Pancasila lebih dipahami sebagai filsafat bangsa yang menjadi dasar negara untuk tetap hidup dan berkembang. Pancasila merupakan “*common consensus*” filsafat bangsa dan ideologi negara. Amin Rais pernah mengemukakan pandangannya mengenai sejarah kelahiran Pancasila dalam hubungannya dengan pluralitas bangsa Indonesia. Ia menyatakan:

“... Before we proclaimed independence, the founding fathers had not been able to come to a common consensus regarding our national philosophy, our State ideology. Of course, most of our founding fathers were Muslims, they believed in Islam as the basis of the State but there were also some Christian leaders in the independence struggle who have been there centuries ago. So they were also legitimate citizens of our republic, our future republic. So when our founding fathers discussed the basis of the State, some of them believed that Islam must become the basis of the State but the Christian leaders did not agree so I think a general agreement was made that Pancasila would be the common State ideology or philosophy.”<sup>18</sup>

Secara etimologis, istilah *Pancasila* berasal dari bahasa Sansekerta India (bahasa kasta Brahmana). Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci *Tri Pitaka*, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: *Suttha Pitaka*, *Abhidama Pitaka* dan *Vinaya Pitaka*. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk

---

<sup>17</sup> Lihat *The Essence and Characteristics of Pancasila Democracy*. <http://www.indon.dk/pancasila.htm> yang menyatakan “Pancasila, the philosophy of the state, is not a philosophy created by an individual, such as the philosophy of Hegel, Aristotle, Kant, or other such philosophers. Pancasila philosophy was created as the nation's philosophy to become the foundation of the state to survive and to develop. It should therefore grow and stand firm in the dynamics of society and be preserved in line with the consensus developing at any time.”

<sup>18</sup> Lihat hasil wawancara Koya Kutty dengan Amin Rais pada kegiatan *the International Seminar on Kashmir and Palestine* yang diselenggarakan *Islamic Party of Malaysia* di Kota Bharu, Malaysia on July 25. *Muslimedia*, 15 Januari 1998. <http://www.muslimedia.com/archives/sea98/amien.htm>

mencapai Nirwana dengan melalui *Samadhi*, dan setiap golongan memiliki kewajiban moral yang berbeda. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut: *Dasasyiila*, *Saptasyiila*, dan *Pancasyiila*.<sup>19</sup>

Ajaran *Pancasyiila* menurut Budha merupakan lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. *Pancasyiila* yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

*Panatipada veramani shikapadam samadiyani*, artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau, dilarang membunuh.

*Dinna dana veramani shikapadam samadiyani* artinya janganlah mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri.

*Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina.

*Musawada veramani shikapadam samadiyani*, artinya janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.

*Sura meraya masja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum-minuman yang menghilangkan pikiran, artinya dilarang minum minuman keras.<sup>20</sup>

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran Hindu dan Budha, maka ajaran Pancasila Budhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada pada zaman Majapahit. Perkataan *Pancasila* yang mulai diadopsi ke dalam khazanah kesusastraan nenek moyang kita pada zaman keemasan kerajaan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan mahapatih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam *keropak Negarakertagama* berupa *kakawin* (syair pujian) karya pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun

---

<sup>19</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2001), edisi V, hlm. 20-21

<sup>20</sup> *Ibid.*

1365, tepatnya pada *sarga* 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"*Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka kerama*" yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (*Pancasyiila*), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.<sup>21</sup>

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (*Pancasila*) tersebut ternyata masih juga hidup dan dikenal dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan lima larangan atau lima pantangan moral yaitu dilarang: *Mateni* artinya membunuh, *Maling* artinya mencuri, *Madon* artinya berzina, *Mabok* artinya meminum minuman keras atau menghisap candu, *Main* artinya Berjudi. Semua hurup dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf M atau dalam bahasa Jawa disebut "ma", oleh karena itu lima prinsip moral tersebut "*ma lima*" disebut lima larangan.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan *Pancasila* memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: *panca* artinya lima, *syila* vokal i pendek artinya "*batu sendi, alas, atau dasar*; *syiila* vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, atau khususnya bahasa Jawa, diartikan dengan *susila* yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis kata *Pancasila* yang dimaksudkan adalah istilah *Panca Syila* dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal *berbatu sendi lima* atau secara harfiah, *dasar yang memiliki lima unsur*. Adapun istilah *Panca syiila* dengan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Ismaun, *Pembahasan Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia*, (Bandung: Yulianti,1981), hlm. 79

huruf *Dewanagari* i bermakna lima aturan tingkah laku yang penting.<sup>23</sup>

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk memenuhi kelengkapan sebagaimana lazimnya suatu negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 mereka berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan, yang terdiri atas 4 pasal, 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 45 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Mahaesa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional dianggap sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Rumusan Pancasila itu disahkan oleh PPKI, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Meski demikian, dalam sejarah perkembangan tatanegara Indonesia serta dalam upaya mempertahankan Proklamasi dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, muncul beberapa rumusan Pancasila yang lain.

---

<sup>23</sup> Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1960), hlm. 437

## PENDIDIKAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

*... Karakter kebangsaan adalah pengembangan karakter yang berakhlak mulia, yang tangguh, kompetitif, beramal, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila..*

Banyak konsep yang menjelaskan tentang pendidikan karakter, pendidikan yang menekankan pada aspek apektif peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya mempunyai kecerdasan intelektual saja, akan tetapi kecerdasan emosionalpun juga mereka miliki. Secara etimologi pendidikan karakter berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Kata pendidikan (*edication*) merupakan kata turunan dari bahasa latin *educare*. *Educare* dalam bahasa Latin merupakan bahasa yang agak menjijikan karena disamakan dengan mengurus hewan yang liar bisa menjadi jinak sehingga bisa ditenakan.<sup>24</sup> Jadi, pendidikan adalah semua proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membuat yang tidak tertata menjadi tertata, semacam membuat kultur dan tata keteraturan dalam diri maupun dalam diri orang lain.

---

<sup>24</sup> Doni Kusuma. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik anak di Zaman Global*, Jakarta, Grasindo, 53

Sementara itu yang dimaksud dengan karakter adalah berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti mengukir sehingga menjadi sebuah pola.<sup>25</sup> Mempunyai karakter yang baik tidaklah terbentuk dengan sendirinya, melainkan harus ada pola yang dibuat. Hal ini akan terbentuk apabila dilakukan sebuah tindakan pengasuhan dan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pendidikan terdapat dua tindakan yaitu pola asuh yang biasa dilakukan kepada peserta didik yang masih di bawah umur, pengajaran yang biasa kita temukan pada jenjang pendidikan yang mulai dari pendidikan dasar. Melalui jalur pendidikan tersebut pola-pola yang diinginkan dalam pembentukan karakter peserta didik akan terbentuk, setelahnya guru merancang terlebih dahulu proses pembelajaran yang akan dilakukan selama proses pembelajaran tersebut berjalan baik berupa tahunan maupun yang bersifat semester.

Karakter juga merupakan salah satu konsep menyeluruh yang menjadi subjek disiplin dari filsafat teologi, dari psikologi ke sosiologi-dengan banyak teori yang bersaing dan saling bertentangan. Konsep karakter yang berkaitan dengan pendidikan paling sering digunakan untuk merujuk kepada bagaimana seseorang berperilaku baik - dengan kata lain, orang yang menunjukkan kualitas pribadi yang sesuai dengan apa yang dianggap dan diinginkan oleh masyarakat. Kualitas pribadi seperti ini sering kemudian dilihat sebagai tujuan pendidikan.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Arab karakter ini mirip dengan akhlak, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik. Al-Ghajali menggambarkan bahwa akhlak adalah tingkah laku seseorang yang keluar dari hati yang baik. Pada sisi lain karakter bisa diartikan juga sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatery dalam diri

---

<sup>25</sup> Bohlin, Karen. 2001. *Building in School*, California, Jossey Bass

<sup>26</sup> Jimmy Wales. 2010.

[http://en.wikipedia.org/wiki/Character\\_education](http://en.wikipedia.org/wiki/Character_education)



dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan<sup>27</sup>.

Sementara itu, pendidikan tersendiri yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan yang dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah pendidikan yang lebih berorientasi kepada penanaman nilai yang lebih cenderung kepada skala apektif dan perilaku dalam mempersiapkan peserta didiknya menghadapi tantangan zaman pada masa yang akan datang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang mendorong kaum muda beretika, bertanggung jawab, dan peduli dengan lingkungan dan mengajarkan karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai yang bersifat universal bagi kita semua.<sup>28</sup> Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah pendidikan yang lebih dapat menjaga dan mengembangkan karakter yang sudah melekat pada bangsa tersebut yang nantinya akan menjadi ciri suatu karakter yang khas.

Di dalam pengembangan pendidikan karakter bukan hanya penanaman nilai-nilai Nasional, melainkan pendidikan karakter juga harus menanamkan nilai-nilai yang bersifat global. Pada tataran pendidikan karakter yang bersifat Nasional terlihat

---

<sup>27</sup> Bohlin, Karen. 2001. *Building in School*, California, Jossey Bass

<sup>28</sup> public school of north Carolina. 2010.

<http://www.ncpublicschools.org/charactereducation/>

dari pengembangan karakter pemerintah itu tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa program pemerintah tentang karakter kebangsaan adalah pengembangan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, beramal, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.<sup>29</sup> Pengembangan dan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh di tengah pergaulan global.

Selanjutnya Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional komitmen tentang pendidikan karakter tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Jika dicermati semua elemen dari tujuan tersebut terkait erat dengan karakter.

Selanjutnya, dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan karakter bukan hanya bersifat Nasional melainkan pendidikan karakter yang harus dihasilkan juga bersifat global. Hal-hal yang bersifat Nasional adalah bagaimana dengan pendidikan karakter mampu mempertahankan ciri atau identitas dari suatu bangsa. Identitas tersebut adalah merupakan jati diri yang menjadi kebanggaan Negara. Hal tersebut dapat terlihat ketika kita ketahui bahwa budaya santun, sapa, senyum, dan berpakaian yang sopan (ke-Timuran), gotong royong, saling menghargai adalah merupakan identitas masyarakat bangsa

---

<sup>29</sup> Armida S. Alisjahbana. 2010. *Pendidikan Nasional dan Pengembangan Karakter Bangsa*. Tangerang, 12

Indonesia yang nantinya hal tersebut adalah jembatan untuk tercapai tujuan pendidikan tersendiri. Hal tersebut tentu akan baik apabila dikembangkan melalui jalur pendidikan yang nantinya akan menjadi karakter yang melekat pada suatu bangsa dan akan menjadi perhatian dimata dunia Internasional.

Dalam pengembangan pendidikan karakter yang bersifat internasional atau global terlihat dari adanya keinginan dari pemerintah terhadap rakyatnya atau peserta didik agar selalu merespon terhadap perkembangan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi yang saat ini sudah menjadi bahan kajian kita sehari-hari. Selain itu, pendidikan yang bersifat global juga tercermin dari budaya-budaya sehari-hari, seperti menjaga lingkungan alam sekitar, menjaga keberlangsungan kehidupan suatu kelompok, mampu memahami ketentuan-ketentuan atau kebiasaan suatu Negara atau wilayah yang bersikap universal

Untuk menuju pada katagori tersebut sangat diperlukan pilar-pilar untuk mengembangkan hal tersebut. Pilar yang harus dikembangkan adalah pilar pada pendidikan di sekolah, keluarga, dan tentu masyarakat sebagai lingkungan terbesar dalam proses pendidikan. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan karakter dapat dimulai dari pendidikan di keluarga.<sup>30</sup> Pendidikan pada keluarga meliputi keluarga tunggal, keluarga luas, dan keluarga orang tua tunggal. Selanjutnya pada tataran pilar pendidikan yaitu sekolah, pendidikan tinggi, satuan pendidikan, dan pendidikan non formal. Sementara itu pengembangan pada pilar masyarakat adalah komunitas, masyarakat Nasional, wilayah, bangsa, dan Negara. Pilar-pilar tersebut adalah merupakan suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai ideal, nilai instrumental dan nilai

---

<sup>30</sup> New Jersey. *PTA and Character Education*, Perfect Together.  
[http://www.google.co.id/search?as\\_q=character+education](http://www.google.co.id/search?as_q=character+education)

praktis. Yang mana semua nilai tersebut akan tercapai melalui proses intervensi dan habituasi.<sup>31</sup>

Yang dimaksud dengan proses intervensi adalah proses pendidikan karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran (*learning and instruction*) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan berbagai kegiatan-kegiatan yang terstruktur (*structured learning experiences*). Penanaman nilai intervensi dapat dilakukan pada berbagai mata pelajaran yang terintegasi, sehingga dalam pembelajaran peserta didik akan selalu mengenal dan dihadapkan pada nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan mata pelajaran yang sedang dipelajarinya, Negara kita adalah negara dengan mata pelajaran yang paling terbanyak pada satuan jenjang pendidikan, dengan banyaknya mata pelajaran akan banyak pula nilai-nilai karakter yang didapatkan oleh peserta didik.

Dalam bahasa yang lain dapat dikatakan bahwa yang disebut intervensi tersebut adalah sama dengan pendekatan holistic yang mengintegrasikan pengembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Disinilah beda pendekatan holistic yang meliputi.

1. Segala sesuatu di sekolah diatur sekitar pengembangan hubungan antara siswa, guru, staf, dan masyarakat.
2. Sekolah adalah sebuah komunitas yang peduli kepada peserta didik dimana ada ikatan menghubungkan antara siswa, staf (guru), dan masyarakat.
3. Pembelajaran social dan emosional ditekankan sebanyak pembelajaran akademis.
4. Kerjasama dan kolaborasi diantara pelajar ditekankan dalam persaingan.

---

<sup>31</sup> Dasiman Budiansyah. 2010. Penguatan *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung, Widya Aksara Pers, 62

5. Nilai-nilai seperti keadilan, menghormati, dan kejujuran adalah bagian dari pelajaran sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas.
6. Siswa diberi kesempatan yang cukup untuk mempraktekan kegiatan moral seperti KKN.
7. disiplin dan manajemen kelas berkonsentrasi pada pemecahan masalah daripada imbalan dan hukuman.
8. guru-guru dan siswa mengadakan pertemuan kelas untuk membangun kesatuan membentuk norma-normadan memecahkan masalah.<sup>32</sup>

Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa pendidikan karakter bukanlah pendidikan sebagai *subject matter* yang diajarkan secara khusus dan terpisah pada mata pelajaran tersendiri, akan tetapi semua mata pelajaran melalui guru yang mengajarkannya bisa langsung memberikan penanaman karakter-karakter yang sesuai dengan perkembangan peserta didik pada saat itu. Inilah yang disebut sebagai pendidikan karakter adalah pendidikan yang terintegrasi pada satuan pendidikan dan satuan pembelajaran.

Sementara itu yang dimaksud dengan proses habituasi adalah proses penciptaan aneka situasi dan kondisi yang berisi aneka penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, dan di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasi melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa serta karsa itu sebagai karakter atau watak.<sup>33</sup>

Penciptaan aneka situasi tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari seorang guru yang mengajarkan kepada siswa, guru berperan sebagai fasilitator, moderator, dan sekaligus

---

<sup>32</sup> David. H. Elkin and Freddy Sweet. 2010. *how do character education*.  
[http://www.goodcharacter.com/Article\\_4.html](http://www.goodcharacter.com/Article_4.html)

<sup>33</sup> Dasiman Budiansyah. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung, Widya Aksara Pers, 63

sebagai pengembang kurikulum pada satuan pendidikannya masing-masing. Pada pembelajaran awal tahun adalah merupakan tahapan awal dimana seorang guru akan merancang komponen pembelajaran mulai dari kurikulum yang tertulis dan tidak tertulis, rencana pembelajaran, disain pembelajaran, metode pembelajaran, bahkan sampai pada komponen yang diperlukan oleh peserta didik untuk satu tahun tersebut dalam prose pengembangan karakter .

Sebagai sebuah contoh, karakter jujur terbentuk dalam satu kesatuan utuh dari yang bersifat pengetahuan sampai pada tahapan praktek, sehingga peserta didik akan mengetahui apa yang dimaksud dengan jujur, mengapa harus jujur, dan kapan kita bersikap jujur. Hal tersebut dirumuskan oleh seorang guru sebelum dimulainya proses pembelajaran pada tahun ajaran yang baru.

Isu pendidikan karakter menjadi isu Nasional pada bidang pendidikan, banyak asumsi yang mengatakan bahwa pendidikan karakter itu sama dengan pendidikan moral, Agama, dan pendidikan kewarganegaraan, oleh karena itu perlu di tegaskan apakah sama pendidikan karakter dengan pendidikan moral, pendidikan Agama, dan pendidikan kewarganegaraan? Kalau sama dimana persamaannya? Kalau beda dimana perbedaannya?. Mungkin satu hal yang membuat keempat konsep itu sama, yaitu “pendidikan”. Sebagai kegiatan mendidik, secara umum keempat konsep itu sama-sama membantu siswa bertumbuh secara lebih matang dan dewasa, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk social yang berada pada tatanan kehidupan yang komplek dan plural dalam kontek kehidupan bersama. Mungkin yang jadi perbedaannya adalah pada substansi materi yang disampaikan.

Pendidikan karakter sangat berkaitan dengan pendidikan moral, terutama dengan bagaimana seseorang individu mampu menghayati kehidupannya atau kebebasan dalam hubungan/ relasi mereka dengan orang lain sebagai individu, maupun

dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan karakter. Moralitas selalu berbicara masalah baik dan buruk manusia dihadapan manusia yang lain, sebagaimana moralitas melihat bagaimana manusia yang satu memperlakukan manusia yang lainnya. Secara umum moralitas berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, atau hal-hal secara baik sehingga menjadi cara bertindak, terutama bagi pribadi dan komunitas.

Yang membedakan pendidikan karakter dengan pendidikan moral adalah ruang lingkup dan lingkungan yang membantu individu dalam mengambil keputusan. Dalam pendidikan karakter, ruang lingkup pengambilan keputusan terdapat dalam diri individu, sedangkan dalam pendidikan moral ruang lingkungannya adalah pribadi seseorang.<sup>34</sup>

Sementara itu, pendidikan karakter juga akan erat kaitannya dengan pendidikan keagamaan. Kita dapat ketahui bahwa karakter dalam bahasa suatu teologi dikatakan sebagai *ahklāq*. Dalam bahasa Arab karakter ini mirip dengan *akhlak*, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik. Al- Ghajali menggambarkan bahwa *akhlak* adalah tingkah laku seseorang yang keluar dari hati yang baik<sup>35</sup>. Pada hal ini kita dapat mengetahui bahwa baik pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan mempunyai konsep yang sama yaitu untuk menjadikan perilaku sebagai manusia individu dan social yang akan dipandang baik atau buruk.

Agama akan mengajarkan nilai-nilai yang serasi dengan dengan nilai-nilai pada pendidikan karakter. Kita bisa ketahui bahwa semua agama akan mengajarkan tatanan kehidupan antara individu dan individu dengan kelompok, agama juga mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat jujur tidak membiasakan dalam kebohongan, menganjurkan penganutnya bertanggung jawab terhadap agama yang dipahaminya untuk

---

<sup>34</sup> Dasiman Budiansyah. Hlm. , 198

<sup>35</sup> Bohlin, Karen. 2001. *Op. cit*

dipraktikkan pada tatanan kehidupan yang sesungguhnya, menjaga keharmonisan antara umat beragama dan penganutnya, menghormati hak orang lain, kerja keras, ulet, tekun, dan sebagainya, hal tersebut juga sama dengan tujuan dari pendidikan karakter yaitu membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, mengormati hak orang lain, kerja keras.<sup>36</sup>

Dari uraian di atas kita dapat simpulkan bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara pendidikan karakter dengan agama/pendidikan keagamaan. Agama juga diartikan sebagai pondasi awal dari pendidikan karakter, ini terbukti dengan agama sebagai pengetahuan awal yang diyakini secara emosional yang bisa terlihat dalam perilaku seseorang pada kehidupan sehari-hari, sehingga agama menjadi sebagai *filter* yang akan menjadikan pertimbangan seseorang dalam bersikap dan bertingkah laku, oleh karena itu agama dipandang sebagai karakter yang fundamental dan bersifat emosional yang diyakini oleh seseorang.

Selanjutnya, selain dengan agama dan moral, pendidikan karakter juga erat hubungan dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 1900-an pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan istilah "*civic education*", selanjutnya di Indonesia pada tahun 1994 dikenal dengan PPKn yang bertujuan untuk menanamkan sikap serta perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan mengandung komitmen utama terhadap pencapaian tujuan beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan

---

<sup>36</sup> Bambang Q –Anees. 2008. *Pendidikan karakter Berbasis Al-quran*. Simbiosis rekayasa media .Bandung. 97



berbudi pekerti luhur, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>37</sup>

Dari paparan di atas kita dapat melihat bagaimana isi daripada pendidikan kewarganegaraan adalah sebagian besar merupakan pengembangan karakter-karakter ke-Tuhanan, kebangsaan, kemandirian, dan tanggung jawab. Apabila kita lihat dari tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah terciptanya masyarakat sebagai warga Negara yang baik (*good citizenship*). Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter, pendidikan moral, Agama, dan kewarganegaraan, mempunyai kesamaan tujuan yaitu untuk menjadikan masyarakat yang baik sebagai individu dan individu sebagai kelompok masyarakat.

Indonesia sampai saat ini belum mempunyai pendidikan karakter yang efektif untuk menjadikan bangsa Indonesia yang berkarakter, padahal kalau kita ketahui banyak mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisikan pesan-pesan moral, seperti mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, dan Pancasila. Akan tetapi hal ini berbanding balik dengan keadaan di lapangan yang semua mata pelajaran tersebut dalam prakteknya cenderung kepada proses hapalan. Tentunya dalam proses penilaiannya pun juga hanya berada pada satu data penilaian yaitu berupa pemberian angka atau disebut dengan pengskoran.

Oleh karena itu pendidikan karakter yang mungkin dikembangkan di negara kita adalah pendidikan karakter yang mampu mempertahankan karakter kebangsaan dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>37</sup> CISED & CCE. 1999. *The Development of Concept and Content*. Bandung. Hlm. 21

## REFLEKSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

*... Pendidikan nasional harus didasarkan atas suatu kerangka filosofis yang bersumber pada filsafat negara, yakni Pancasila yang berfungsi sebagai sarana transformasi ilmu, sosial budaya, dan juga sebagai sarana mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya...*

Kehidupan manusia tidak lepas dari nilai, yang pada tahapan berikutnya perlu untuk diinstitutionalisasi. Institutionalisasi nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. Freeman Butt, dalam bukunya *Cultural History of Western Education*, menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai, proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai serta penyesuaian terhadap nilai.<sup>38</sup> Pendidikan sebagai ilmu praktis yang normatif berarti menetapkan asas norma yang hendak dilaksanakan oleh proses pendidikan. Ilmu pendidikan menjadi pembimbing praktis pelaksanaan membina kepribadian manusia. Dan asas-asas normatif yang berlaku di dalam masyarakat dan negara menjadi nilai-nilai ideal yang menjadi pendorong, motivasi bagi anak didik

---

<sup>38</sup> Wayan Ardhana, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Malang: FIP-IKIP Malang, 1986), hlm. 36-39

dalam cita-cita hidupnya, *self realization*. Bahkan nilai-nilai itu pula yang menjadi isi pokok (*core curriculum*) pendidikan.<sup>39</sup>

Sistem nilai mempunyai relasi timbal balik terhadap proses pendidikan. Sistem nilai memerlukan transmisi, pewarisan, pelestarian, dan pengembangan melalui pendidikan. Demikian juga dalam proses pendidikan, sistem nilai dibutuhkan agar pelaksanaannya berjalan dengan arah yang pasti, karena senantiasa berpedoman pada garis kebijakan yang dimunculkan oleh nilai-nilai tersebut.<sup>40</sup> Sistem nilai tidak hanya digunakan sebagai bahan konsultasi dalam rumusan tujuan pendidikan, tetapi juga menjadi acuan dalam sistem, strategi, dan teknologi pendidikan, yang mencakup masalah pendidik, anak didik, kurikulum pendidikan, metode dan media pendidikan, serta interaksi edukatif dengan dunia luar dan di dalam lembaga sendiri. Tegasnya, nilai yang menjadi tumpuan pendidikan dapat memberi skala kognitif dan skala evaluatif terhadap kegiatan dan kebijaksanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan formula alternatif untuk mengembangkan segenap potensi manusia menuju ke arah kedewasaannya. Pendidikan juga merupakan upaya sistematis untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individu. Dari sudut pandang masyarakat pendidikan berarti pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dari sudut pandang individu pendidikan berarti pengembangan potensi yang masih tersembunyi dalam diri seseorang.<sup>41</sup> Jika dihubungkan dengan Pancasila, pendidikan berarti pengamalan nilai-nilai Pancasila

---

<sup>39</sup> Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), cet. IV, hlm. 140-141

<sup>40</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.124

<sup>41</sup> Hasan Langgulung, *Azaz-azaz Pendidikan Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1992) cet. Ke-2, hal. 1

sebagai upaya mencapai salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nasional harus didasarkan atas suatu kerangka filosofis yang bersumber pada filsafat negara, yakni Pancasila. Pendidikan, selain berfungsi sebagai sarana transformasi ilmu, sosial budaya, juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Pendidikan yang didasarkan atas Pancasila berarti menjadikan Pancasila sebagai salah satu bahan dan sumber pendidikan yang menjiwai bahan dan sumber pendidikan lainnya. Atau juga bisa diartikan bahwa segala aspek dalam pendidikan baik sistem, teoretisasi maupun operasionalisasinya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bangsa Indonesia yang mempunyai keyakinan dan berpandangan hidup Pancasila, harus menjadikan Pancasila sebagai dijadikan filsafat dan paradigma pendidikannya.

Apabila ditelaah secara seksama, sebagai paradigma pendidikan nasional, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Nilai dasar*, yaitu hakikat dari kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai.
- b. *Nilai Instrumental*, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar sehingga setiap praktik pendidikan berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila.
- c. *Nilai Praksis*, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental melalui realisasi pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan

zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Selain itu, apabila ditelaah secara seksama, sebagai paradigma pendidikan nasional, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung tiga dimensi sebagai berikut:

- a. *Dimensi idealistik*, atau disebut juga nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yakni hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara menyeluruh, meliputi nilai *ketubanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan*. Semua hakikat nilai itu bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila). Karena setiap ideologi bersumber pada suatu nilai-nilai filosofis atau sistem filsafat.<sup>42</sup> Kadar serta idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi masyarakat untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan .
- b. *Dimensi Normatif*, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Dalam pengertian ini Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia serta merupakan *Staatsfundamentalnorm* (pokok kaidah negara yang fundamental). Dalam pengertian ini, agar ideologi Pancasila bisa dijabarkan ke dalam langkah operasional, maka diperlukan adanya norma-norma yang jelas.<sup>43</sup>
- c. *Dimensi Realistis*, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif, juga harus mampu dijabarkan

---

<sup>42</sup> Soeryanto, *Op. Cit.*, hlm. 235

<sup>43</sup> *Ibid.*

dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat '*utopis*' yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat '*realistis*'. Artinya, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam segala aspek kehidupan nyata.

Menurut Notonegoro,<sup>44</sup> Pancasila sebagai perkataan adalah sebutan, suatu istilah untuk memberi nama kepada dasar filsafat atau dasar keruhanian negara kita. Di dalam nama itu tidak tersimpul isi dari suatu dasar filsafat negara, melainkan hanya ditunjukkan, bahwa dasar filsafat negara itu tersusun atas lima hal, yang masing-masing merupakan suatu sila, suatu asas peradaban, suatu asas keadaban. Sila-sila yang terdapat di dalamnya merupakan bagian dari suatu keutuhan dan juga merupakan bagian-bagian dalam hubungan kesatuan.

Secara umum, semua materi yang terkandung Pancasila dan berwujud lima sila merupakan saripati dari berbagai watak, sikap dan keperibadian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila diberi tafsiran-tafsiran operasional normatif. Hal itu untuk lebih memudahkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan. Tafsiran itu menjadi satu keniscayaan karena pada dasarnya Pancasila merupakan filsafat, sedangkan filsafat hanyalah uraian-uraian konsep yang bersifat filosofis-logis. Uraian lebih lanjut dan operasional bisa dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang organik<sup>45</sup> dan berbagai norma-norma hukum lainnya.

---

<sup>44</sup> Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), Cet, ke-7, hal. 1

<sup>45</sup> Undang-Undang Organik adalah Undang-Undang sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar. Ini merupakan hasil kerjasama eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). Undang-Undang organik ini sifatnya lebih operasional. Contohnya, Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang perpajakan, Undang-Undang pertahanan dan sebagainya.

Inti mutlak Pancasila mempunyai sifat universal, dapat digunakan manusia dimana saja dan kapan saja, tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Di samping mempunyai sifat universal, dalam penggunaannya secara praktis Pancasila mempunyai sifat kolektif dimana Pancasila itu digunakan, tergantung dari bagaimana cara melaksanakannya yang dipengaruhi oleh keadaan, sebagaimana rumusan Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.<sup>46</sup>

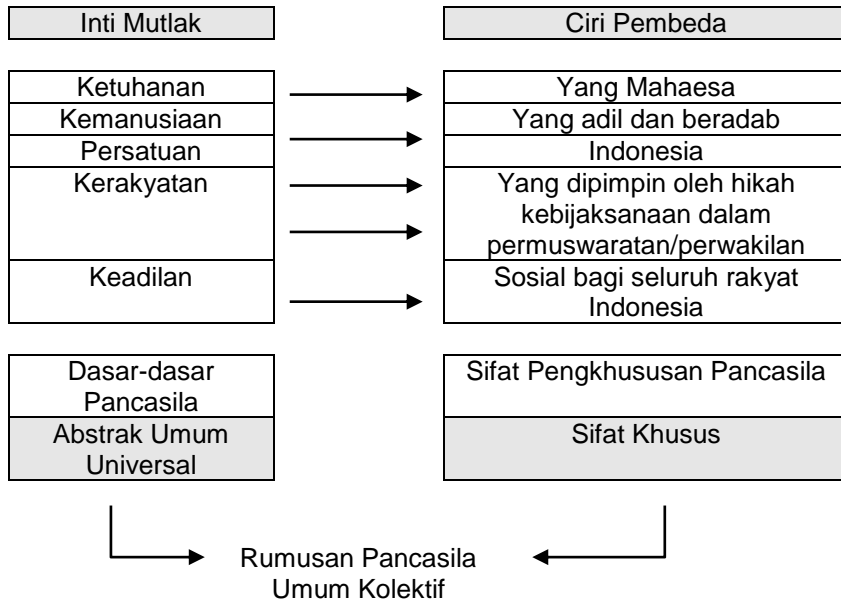
Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal tetap tidak berubah dan dapat berlaku di mana saja. Dari sifat abstrak umum universal dapat disusun isi arti Pancasila umum kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara. Pengertian umum kolektif ini di dalam sifat umumnya mempunyai tingkatan-tingkatan tergantung dari banyak sedikitnya beragam unsur yang termasuk di dalamnya.

Isi arti Pancasila umum kolektif merupakan wujud pelaksanaan atau penjelmaan sebagai pedoman praktis bagi penyelenggaraan negara yang di dalam pelaksanaannya memungkinkan seseorang untuk memberikan isi yang berbeda-beda kepada Pancasila, asal tetap di dalam batas-batas isi yang abstrak umum universal dan tak berubah. Untuk membedakan dua macam sifat umum Pancasila dapat digambarkan secara jelas dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram sifat umum Pancasila. Rumusan Pancasila yang bersifat umum kolektif adalah gabungan antara inti mutlak beserta ciri-ciri pembeda dalam Pancasila, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945.

---

<sup>46</sup> Noor MS. Bakry, *Orientasi Pancasila* (Yogyakarta, Liberty, 1990) Cet. I, hlm. 53

Gambar  
Diagram Sifat Umum Pancasila



Bagi bangsa Indonesia, Pancasila sesungguhnya telah menempatkan bangsa ini setara dan bisa duduk berdampingan dengan negara-negara lain sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita menjadi bangsa yang unik dengan ideologi sendiri, hingga tak terseret ke dalam pusaran polarisasi yang pernah membagi dunia ke dalam dua bagian sama besar. Kita bisa lolos dari kepungan praktik-praktik percobaan ideologi lain yang merupakan satu cara untuk menunjukkan superioritas moral dari gagasan-gagasan baru ke dalam tatanan kehidupan bernegara kita. Dalam proses ini tergambar bagaimana aspek emosional masyarakat akan identitas nasional dan patriotisme telah dipadukan ke dalam sebuah sistem ideologi.

Namun demikian, apabila Pancasila dihubungkan dengan uraian paradigma pendidikan di awal buku ini, pertanyaan



menarik untuk dikaji adalah apakah Pancasila merefleksikan dan menawarkan paradigma tertentu untuk pengembangan sistem pendidikan nasional sampai saat ini? Bagaimana Pancasila sebagai paradigma pendidikan nasional menjelaskan sudut pandang menyeluruh (*total outlook*) mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional? Nilai-nilai Pancasila apakah yang harus dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional?

Kajian filosofis tentang nilai Pancasila di muka mengisyaratkan bahwa nilai pertama dan utama dalam Pancasila adalah nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang dapat dijabarkan dari sila pertama ialah bahwa manusia itu makhluk Tuhan, dimana Tuhan terus memeliharanya ke arah yang dikehendaknya. Sila itu merupakan nilai dasar yang lahir dari keberadaannya sebagai hamba Tuhan; manusia dilahirkan sama; manusia dilahirkan merdeka. Premis-premis yang didapatkan dari nilai dasar ini ialah: kehendak, keinginan serta kepentingan pribadi diakui, tetapi harus dibatasi oleh penghargaan terhadap sesama manusia serta ditundukkan pada ketentuan normatif yang bersumber dari Tuhan Yang Mahaesa. Dasar Ketuhanan Yang Mahaesa mengarahkan manusia untuk melaksanakan harmoni di dalam alam dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Nilai ketuhanan ini hendaknya menjadi basis dalam paradigma pendidikan Nasional. Pendidikan nasional diartikulasikan sebagai upaya sistematis untuk menginternalisasikan dan mensosialisasikan nilai-nilai ketuhanan seperti yang digambarkan oleh filsafat Pancasila. Pendidikan Nasional hendaknya bertumpu pada nilai-nilai ketuhanan.

Pandangan tentang pentingnya reformulasi paradigma pendidikan nasional dengan menetapkan nilai-nilai ketuhanan sebagai *core* pendidikan ini sudah lama berkembang. Ahmad Tafsir dalam banyak kertas kerja dan seminarnya, sangat intensif menggulirkan gagasan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dengan *core*

iman dan takwa ini. Ia berpandangan bahwa *core* Pancasila adalah sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dan *core* sila Ketuhanan Yang Mahaesa adalah keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya, sistem pendidikan nasional seharusnya menetapkan iman dan takwa sebagai *core* tujuan pendidikan nasional. Ia mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

Pendidikan kita belum pernah menjadikan pendidikan keimanan itu sebagai inti (*core*) kurikulum pendidikan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Permasalahannya terletak pada paradigma, bukan pada jumlah jam pelajaran. Pendidikan keimanan seharusnya menjadi ruh pendidikan, menjadi jiwa yang menjwai pendidikan. Jika paradigma ini dianut, maka penanaman iman itu akan berhasil dengan baik. Bila kita konsisten pada Pancasila sebagai sumber hukum, maka pada ujungnya pendidikan keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa memang harus menjadi *core* pendidikan, harus menjadi *core* kurikulum.<sup>47</sup>

Apabila ditelaah secara mendalam, pemikiran itu ternyata sangat relevan untuk digulirkan sebagai kebijakan pembangunan nasional. Jika dianalogikan dengan pemikiran Kuhn tentang lahirnya paradigma baru karena adanya krisis atas anomali, maka penyelenggaraan pendidikan nasional dewasa ini memang sangat nyata telah menghadirkan anomali-anomali sosial yang bertumpu pada kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai Ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Betapa tidak, masalah krisis multi dimensi dan degradasi moral yang dihadapi manusia Indonesia, yang terakumulasi dalam istilah KKN, sesungguhnya bertumpu pada kurangnya nilai moralitas yang sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai Ketuhanan.

Ironisnya, pemahaman orang tentang determinasi krisis multi dimensi bangsa ini jarang yang ditujukan pada pentingnya reformulasi paradigma pendidikan nasional. Ada keprihatinan yang perlu ditanggapi dan direspons secara serius di negeri kita berkenaan dengan pendidikan. Tampaknya, pendidikan belum

---

<sup>47</sup> Inferensi terhadap pemikiran Ahmad Tafsir pada tahun 1999-an.

dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terpuruknya bangsa ini. Terbukti bahwa tudingan-tudingan sebagian besar pengamat, apalagi para politisi hanya diarahkan pada ekonomi dan politik. Pendidikan seolah bukan bagian pokok penyebab nyaris ambruknya negeri ini.<sup>48</sup> Padahal senyatanya, sebab utama lahirnya KKN adalah karena tidak optimalnya transformasi nilai-nilai ketuhanan dalam sistem pendidikan nasional. Ahmad Tafsir menggambarkan hal tersebut dengan ungkapannya:

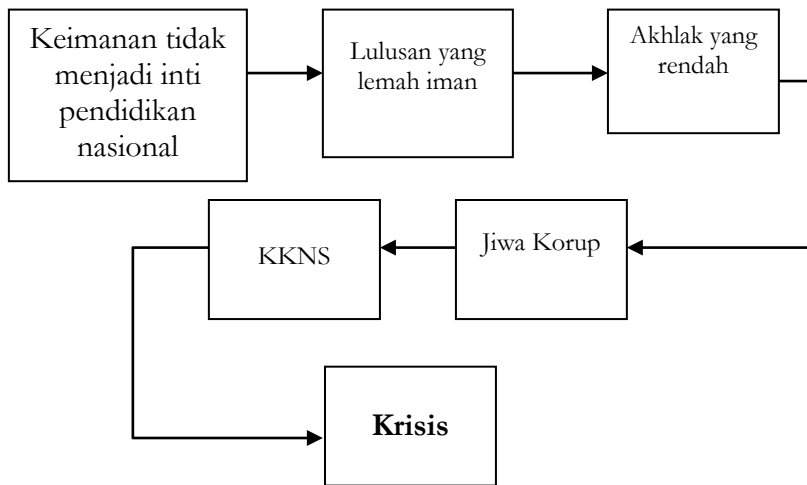
Akhlak yang rendah itu membentuk jiwa yang korup; jiwa korup inilah yang mendorong timbulnya korupsi, kolusi, nepotisme dan kesewenangan (KKNS). Jadi, korupsi, kolusi, nepotisme dan kesewenangan (KKNS) itu induknya adalah jiwa korup itu. Selanjutnya, KKNS itulah yang menyebabkan terjadinya krisis yang kita hadapi saat ini. Kalau begitu, untuk keluar dari krisis dan agar tidak tertimpa lagi di masa yang akan datang kita perlu menghilangkan KKNS itu. Agar hilang, kita harus menghilangkan jiwa korup tersebut. Jiwa korup dapat hilang bila akhlak baik dan akhlak yang baik itu memerlukan iman yang kuat. Iman yang kuat akan dicapai bila pendidikan kita menjadikan pendidikan keimanan sebagai bagian dan *core* sistem pendidikan nasional.

Kronologi terjadinya krisis tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 3. Tilaar mengemukakan hal senada sebagai berikut: bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspeknya, yaitu politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan. Krisis yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional. Lihat Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. I, hlm. 1

Gambar  
Kronologi Terjadi Krisis



Dari gambaran tersebut, tampak jelas bahwa upaya untuk mereformulasi paradigma pendidikan nasional dengan menetapkan nilai-nilai ketuhanan sebagai *core* dalam sistem pendidikan menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak. Meski demikian, nilai-nilai ketuhanan ini, tidak terlampaui tepat untuk sekedar dimaknai sebagai pentingnya pendidikan (pengajaran) agama di sekolah-sekolah dalam sistem pendidikan Nasional. Orientasi paradigma harus lebih diarahkan pada tumbuhnya sikap dan perilaku anak didik yang mencerminkan pribadi manusia sebagai makhluk Tuhan.

Disadari bahwa sampai sekarang ini, pendidikan agama telah ditetapkan sebagai satuan kurikulum atau materi pelajaran yang harus disampaikan pada semua jenjang pendidikan. Namun, pendidikan agama tersebut belum sepenuhnya optimal mengantarkan anak didik menjadi manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan agama saat ini lebih menitik-beratkan pada transformasi sejumlah ‘pengetahuan agama’ yang

bersifat kognitif. Oleh karenanya, sangat mungkin anak didik bisa dengan baik menghafal ayat atau hadits (bagi yang beragama Islam), tetapi tidak cukup cerdas untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Diperlukan orientasi paradigma yang menetapkan bahwa esensi Pendidikan Agama pada dasarnya adalah internalisasi nilai-nilai ketuhanan pada anak didik. Jika pada tahap tertentu nilai-nilai keagamaan belum juga terinternalisasi dalam diri anak, maka tidak layak kita mengatakan bahwa pendidikan agama telah diberikan. Indikator keberhasilan pendidikan agama adalah lahirnya pribadi anak didik yang mampu merefleksikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya. Semua agama di Indonesia hendaknya ikut serta memainkan peran dalam upaya merefleksikan nilai-nilai ketuhanan tersebut berdasarkan keyakinannya masing-masing.

Sekali lagi, tentu saja, pendidikan agama tidak boleh hanya berbentuk pengajaran agama, sebatas pengalihan pengetahuan tentang agama. Pengalihan pengetahuan agama bisa menghasilkan pengetahuan dan ilmu dalam diri orang yang diajar, tetapi pengetahuan ini belum sepenuhnya menjamin manusia yang bersangkutan untuk hidup sesuai dengan pengetahuan itu. Bahkan, pengalihan pengetahuan agama seringkali berbentuk pengalihan rumus-rumus doktrinal dan kaidah-kaidah susila. Karena sebab itulah, pengajaran agama hanya menghasilkan pengetahuan hapalan yang melekat di bibir dan hanya mewarnai kulit, tetapi tidak mampu memengaruhi orang yang mempelajarinya.

Dengan demikian, pendidikan agama yang otentik, selain berusaha menyajikan bahan-bahan pengetahuan, juga mengusahakan pengalaman dan penghayatan nilai-nilai dalam situasi dan lingkungan hidup sehari-hari. Melalui penghayatan, seseorang dibina untuk mengalami secara sadar suatu nilai (*wertver-lebnis*). Dari pengalaman yang sadar ia akan terdorong untuk menghargai nilai yang dijumpainya (*wertschatzung*). Karena yakin

akan harga nilai tersebut, ia mulai menerima nilai bagi dirinya sendiri (*wertbejaung*), dan dalam tiap situasi hidupnya ia akan mengambil sikap positif terhadap nilai yang telah diterimanya itu (*wrtentscheidung*) kemudian mencoba mengejawantahkannya (*wertbestatigung*) dalam kehidupan.<sup>49</sup>

Pendidikan agama hendaknya tidak hanya berusaha meningkatkan kesadaran beragama, melainkan juga mampu meningkatkan kemampuan anak didik untuk melihat kenyataan hidup yang dihadapinya dalam perspektif transendental, untuk melihat keimanan sebagai sumber motivasi kehidupan, dan mengikutsertakan iman dalam penyelaman dan penghayatan seluruh hidup dan kehidupannya.

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, dalam usaha pembangunan, yang dibutuhkan bukan hanya pengetahuan tentang kenyataan-kenyataan sosial yang ada, melainkan juga kemampuan untuk menilai kenyataan sosial itu berdasarkan kriteria yang ditarik dari suatu sistem nilai. Pendidikan agama, di tengah gerak perubahan sosial yang dinamis, mempunyai tugas khusus yakni membina anak didik untuk berkelakuan benar di dalam suatu situasi yang tidak menentu patokan-patokan moralnya.<sup>50</sup>

Saat ini, pembentukan akhlak dalam pendidikan agama lazimnya berupa pelajaran tentang norma-norma atau kaidah-kaidah yang hendaknya kita taati dalam kehidupan kita. Nilai-nilai ini diajarkan dalam bentuk abstrak yang relevansinya terhadap kenyataan sosial tidak mudah ditangkap oleh anak didik, terutama oleh mereka yang belum cukup memiliki pengalaman sosial. Untuk menghadapi keterpurukan karena krisis multi dimensi, pendidikan agama akan memenuhi fungsi sangat vital

---

<sup>49</sup> J. Riberu, "Pendidikan Agama dan Tata Nilai", dalam Sindhunata (ed.), *Pendidikan: Kegelisahan Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001) cet. I, hlm.190

<sup>50</sup> Soejatmoko, "Pendidikan Agama dan Kehidupan Sosial", dalam Sindhunata (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 103

jika berusaha menanamkan motivasi yang kuat kepada anak didik untuk menghubungkan nilai-nilai ketuhanan yang mereka pelajari dengan kenyataan kehidupan yang dihadapinya.<sup>51</sup>

Kajian filosofis tentang nilai Pancasila mengisyaratkan bahwa nilai kedua dalam Pancasila adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang dapat dijabarkan dari sila kedua ialah bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan lanjutan perbuatan dalam praktik hidup dari dasar Ketuhanan Yang Mahaesa. Sila kedua merupakan spirit dan etos yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kata adil dan beradab menguatkan arti dan makna yang terkandung dalam kemanusiaan. Kata adil dan beradab menunjukkan sikap manusia yang utuh lahir dan batin, karena adab menunjukkan sikap ruhaniah, sedangkan adil menunjukkan pada perilaku sebagai ekspresi dari adab. Jika adab lahir dari orientasi supranatural yang bersifat spiritual, maka sikap adil merupakan tanggapan perilaku dalam menghadapi realitas duniawi yang lahir dari orientasi natural.

Dasar kemanusiaan ini hendaknya ditegaskan kembali menjadi basis dalam paradigma pendidikan nasional. Pendidikan nasional diartikulasikan sebagai upaya sistematis dalam menginternalisasikan dan menyosialisasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti yang digambarkan oleh filsafat Pancasila. Pendidikan hendaknya bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan tersebut.

Akhir-akhir ini berkembang pemikiran tentang pentingnya mengubah paradigma pendidikan, karena pendidikan yang ada sekarang belum mampu mengoptimalkan anak didik untuk menjadi manusia senyatanya. Paradigma formalisme pendidikan yang marak dewasa ini telah melahirkan manusia-manusia yang teralienasi dari hakikatnya sebagai manusia. Pendidikan yang mestinya diartikulasikan sebagai upaya memanusiakan manusia, justru mengarah pada dehumanisasi. Dengan pendidikan,

---

<sup>51</sup> *Ibid*

manusia justru diharapkan semakin mengenal dirinya, bukan semakin asing dari dirinya.

Selama era Orde Baru, proses pendidikan telah dikorbankan sebagai proses indoktrinasi. Orde Baru telah membatasi nilai kemanusiaan, khususnya kebudayaan hanya pada aspek intelektual semata. Sistem Pendidikan nasional selama ini hanya terbatas pada pengertian *schooling* yang membatasi diri bagi pengembangan intelektual (satu sisi susunan kodrat manusia Pancasila) dan mengarahkan sumber daya manusia pada kebutuhan pembangunan industri, bukan pembangunan manusia itu sendiri. Spektrum intelegensi manusia hanya dibatasi untuk pengembangan intelektual dan teknologi industri. Intelegensi emosional, bahkan spiritual telah diabaikan. Hasilnya adalah manusia pintar yang dikuasai oleh nilai-nilai keserakahan, kekerasan, dan tumpuhnya rasa kemanusiaan.<sup>52</sup>

Pendidikan nasional harus diperluas maknanya sampai pada pengembangan keseluruhan spektrum intelegensi manusia sehingga mampu melahirkan manusia yang cerdas di dalam arti menguasai kecerdasan akademik dan menjadi manusia berbudaya. Apa yang diperlukan pendidikan nasional sekarang ini adalah paradigma pendidikan yang memiliki tujuan melahirkan manusia yang cerdas dan beradab (*educated and civilized human being*). Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah mengisyaratkan keniscayaan manusia Indonesia untuk memahami kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa masing-masing insan Indonesia mempunyai karakteristik yang unik, individual, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, yang harus dihargai sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Sistem pemerintah hendaknya mengakui tipe kepribadian yang unik dengan memakai pendekatan personal. Setiap program dan gerak pendidikan semestinya mengakui sosok kepribadian yang bervariasi, dan bentuk masyarakat Indonesia yang majemuk.

---

<sup>52</sup> Tilaar, *Op. Cit.*, hlm. 52



Berdasarkan asas ini kita tidak menyetujui berlakunya *staat-pedagogiek* (pedagogik negara) dengan sistem totaliter atau monistik, seperti yang terdapat di negara-negara otokrasi, fasis, komunis dan Nazi. Kita hanya bisa menerima campur tangan pemerintah dalam masalah pendidikan rakyat yang penerapannya bersifat pluralistik atau multiliner, serta tetap berada dalam kerangka kesatuan, persatuan dan kebangsaan Indonesia.<sup>53</sup>

Sistem pendidikan kita masih mengutamakan uniformitas atas dasar persatuan dan kesatuan. Kebijakan pendidikan menekankan kesejajaran pertumbuhan sistem edukasi dengan strategi pembangunan fisik umum (*the overall psysical development strategy*). Akibatnya, pembentukan kepribadian manusia seutuhnya dan pengembangan watak serta budi pekerti masih belum banyak tersentuh, seperti yang diharapkan oleh sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Pendidikan menjadi kurang relevan dengan harapan masyarakat pada umumnya.

Di samping itu, kehendak utopis untuk mengejar kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seperti yang telah dicapai negara-negara kaya dan maju banyak menguasai pikiran para penentu kebijakan pendidikan. Utopia ini sering membuat mereka kurang realistis dalam pembuatan rencana pendidikan. Ide-ide utopis ini justru mencegah para pemimpin untuk menerapkan model-model pendidikan yang orisinal, yaitu model edukasi yang “hidup” dan berfaedah bagi masyarakat luas serta bertumpu pada kebudayaan asli Indonesia. Sebaliknya, mereka banyak mencangkok model-model pendidikan barat dan praktik-praktik edukasi asing yang diasumsikan lebih unggul daripada model-model pribumi. Sedangkan unsur-unsur budaya asli banyak diabaikan dan disingkirkan. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika sistem pendidikan saat ini lebih banyak berkembang pada kecenderungan berikut:

- 1). Pengutamaan pendidikan intelektual, dan semakin berkembangnya paham intelektualisme ekstrim. Kurang

---

<sup>53</sup> Kartini, *Op. Cit.*, hlm. 233

dikembangkan pendidikan perasaan kemauan, vokasional/kejuruan, kesenian, pembentukan watak dan kepribadian manusia secara utuh.

- 2). Pendidikan lebih banyak diartikan sebagai “pengajaran”, transfer informasi-informasi baru, dan ilmu pengetahuan yang diperjualbelikan dengan harga mahal, mengindikasikan adanya tendensi ke arah komersialisasi pendidikan.
- 3). Pemerintah lebih menekankan masalah uniformitas dan konformitas pada keputusan-keputusan makro/nasional, dan kurang mampu menjabarkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak didik serta kebutuhan masyarakat di tempatnya (kebutuhan lokal).
- 4). Banyak terjadi verbalisme; sebab daya kritis dan kemampuan kreatif anak didik kurang dilatih atau kurang ditumbuhkan. Ditambah dengan adanya materi pengajaran yang lebih bersifat kebarat-baratan, urban dan asing (bagi pengalaman eksistensial anak-didik), kurang menyentuh realitas hidup anak didik dan orang tua mereka—khususnya anak-anak desa. Akhirnya, pendidikan menjadi sangat majemuk dan kurang menarik bagi anak-didik.<sup>54</sup>

Refleksi nilai-nilai sila ketiga Persatuan Indonesia mengindikasikan bahwa pendidikan Indonesia bersifat nasional, karena rakyat Indonesia merupakan satu bangsa berdasarkan nilai persatuan dan kesatuan. Pengertian kebangsaan atau perasaan satu bangsa ini didasarkan atas teori geopolitik yang mewadahi kesatuan rakyat Indonesia di bumi tempat hidup kita, berkat karunia Tuhan Yang Mahakuasa, dan ditambah dengan hasil perjuangan merebut kemerdekaan untuk membuat sejarah baru. Sebagai satu bangsa, yang terdiri atas kurang lebih 250 suku bangsa yang mendiami  $\pm$  15.000 pulau-pulau besar dan kecil, tersebar di sepanjang garis khatulistiwa dan memiliki banyak

---

<sup>54</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis (Apakah Pendidikan masih diperlukan)*, (Bandung Mandar Maju, 1992), hlm. 235

perbedaan adat istiadat, bahasa dan kebudayaan, maka semua keanekaragaman sifat bangsa ini harus dijadikan unsur pemerkaya dan penggerak dalam pembangunan hidup kebangsaan, hidup kenegaraan dan hidup kemanusiaan.

Dalam sistem pendidikan yang pluralistik, negara tidak terlalu banyak mengurus pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah dengan segala taktik pelaksanaan di lapangannya. Akan tetapi, pemerintah lebih memusatkan usahanya dalam pengurusan prosedur-prosedur pokok; misalnya menentukan tujuan nasional pendidikan, standarisasi pendidikan, penetapan undang-undang pendidikan, budget nasional untuk pendidikan, kurikulum nasional, perlu tidaknya ujian negara, dan seterusnya. Dengan demikian, akan terdapat otonomi yang lebih besar bagi daerah-daerah untuk melaksanakan praktik pendidikan, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan daerah yang bersangkutan, mengarah pada pembangunan serta pengembangan potensi wilayahnya, namun tetap dalam kerangka kesatuan bangsa.<sup>55</sup>

Dewasa ini ada perkembangan yang menggembirakan berkenaan dengan permasalahan otonomi pendidikan dengan ditetapkannya UU No. 22/99 sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota. Hampir semua urusan publik, kecuali lima yang menjadi urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap kabupaten atau kota memiliki kekuatan sendiri untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pembangunan, pun termasuk di dalamnya kewenangan di bidang pendidikan. Proses dan arus perubahan pelimpahan wewenang ini pada perspektif khusus disebut sebagai otonomi pendidikan.

Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah

---

<sup>55</sup> Kartini, *Op. Cit.*, hlm. 233

meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pasal ini menegaskan bahwa bidang pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintahan pusat, tetapi sudah didesentralisasikan kepada daerah.

Negara mempunyai kewenangan untuk menentukan aturan dan perundang-undangan guna memberikan pola dasar umum bagi sistem pendidikan nasional dan pelaksanaannya. Negara berfungsi mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan agar tidak berlangsung usaha-usaha negatif yang merongrong dan memecah-belah persatuan bangsa, serta tidak merugikan rakyat. Fungsi regulasi dan kontrol tadi dilakukan seadil dan semerata mungkin, tanpa adanya unsur komersialisasi. Peranan negara dalam pengurusan pendidikan bersifat aktif, yaitu mengarahkan, membimbing dan mengawasi; dan jelas bukan dalam pengertian memonopoli pendidikan serta melakukan *regimentasi* ketat terhadap pelaksanaan pendidikan. Peranannya harus bersifat kreatif-konstruktif.

Prinsip desentralisasi sebagai proses penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom membuka ruang yang cukup luas untuk menyelenggarakan otonomi pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, otonomi pendidikan membuka ruang penyelenggaraan prinsip desentralisasi di pihak lain. Mekanisme pengelolaan pendidikan nasional tersistematisasi dalam kerangka sebagai berikut: a) PP 25/2000 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan dalam pengelolaan pendidikan; b) Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menentukan standar normatif pendidikan; c) Propinsi memiliki kewenangan menyediakan bahan ajar pokok; d) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam PP 25/2000, yakni bidang sarana prasarana, guru dan tenaga administrasi, pembiayaan, pengem-

bangun sumber daya manusia, manajemen operasional sekolah, hubungan dengan pihak luar, dan strategi instruksional.

Gambaran ini memberikan pemahaman bahwa otonomi pendidikan memberi dampak luas, baik kelembagaan maupun manjerial dalam pengelolaan pendidikan. Di luar jenjang pendidikan tinggi, fungsi pengelolaan pendidikan dasar dan menengah lebih banyak diemban oleh pemerintah daerah, sehingga diperlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing daerah.

Peranan negara dalam pengurusan pendidikan nasional memang harus aktif, akan tetapi tidak overaktif, sehingga mengikis habis kemauan masyarakat itu sendiri, lalu sepenuhnya diganti dengan keinginan para perencana pendidikan yang ada di pusat birokrasi, yang biasanya tidak cukup arif memahami keinginan dan kondisi sosial budaya yang dihadapi masyarakat. Kecenderungan overaktif itu harus dihindari agar pendidikan tidak bersifat *asosial* dengan fakta sosial yang melingkupinya.

Konsep-konsep edukatif yang dikembangkan kaum birokrasi seringkali tidak menyentuh atau memperhatikan aspirasi rakyat, serta menjawab kebutuhan masyarakat, karena sering didasarkan atas pengalaman edukatif para birokrat di negara-negara maju. Akibatnya, sebagian besar institusi pendidikan yang dikembangkan tampak seperti sebuah imitasi dari model lembaga-lembaga pendidikan di negara-negara maju; sistem pendidikan kita tampaknya hanya mencitrakan kebutuhan edukatif kelompok masyarakat yang relatif berkecukupan, orang-orang yang berpendapatan tinggi atau masyarakat kelas menengah. Dengan kata lain, sistem pendidikan kita saat ini kurang menyentuh tema-tema kemiskinan—dalam pengertian sangat sedikit memper-masalahkan kondisi kemiskinan yang dialami mayoritas rakyat, khususnya yang tinggal di daerah-daerah terpencil pedesaan dengan berbagai macam keterbelakangannya. Darmaningtyas mengemukakan fenomena tersebut dengan ungkapan yang agak keras:

Kritik yang sangat tajam terhadap kurikulum pendidikan nasional adalah terlalu sentralistik dan Jawa sentris. Dan ternyata, kurikulum seperti itu telah terbukti gagal karena tidak mampu menciptakan manusia secara individu maupun bangsa yang mandiri. Oleh karena itu kurikulum sekarang dan masa-masa mendatang harus disusun berdasarkan semangat desentralisasi.<sup>56</sup>

Sila keempat atau sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” mengandung pengertian bahwa negara Indonesia itu adalah negara demokratis. Negara RI ini ada berkat kemauan rakyat dan untuk rakyat, berdasarkan kekuasaan yang ada di tangan rakyat (rakyat memegang kedaulatan penuh). Negara Republik Indonesia kita jelas didukung oleh kemauan seluruh rakyat berdasarkan permusyawaratan dan gotong royong. Hal ini berarti bahwa kepentingan rakyat, kemajuan masyarakat, dan kesejahteraan seluruh rakyat dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu pendidikan nasional harus benar-benar dikelola demi kepentingan rakyat.

Dalam nafas sila keempat dari Pancasila (sila demokrasi) tersebut refleksi paradigma diarahkan agar pendidikan dapat membentuk prototipe “kepribadian Indonesia” yang sadar akan jati dirinya, bersikap demokratis, serta mau bekerja keras membangun negara dan bangsa.

Demokrasi sebagai fenomena politik, dan pendidikan sebagai fenomena sosial merupakan dua hal yang dapat dikombinasikan dan bisa saling melengkapi (komplementer sifatnya). Demokrasi ini dijadikan prinsip dan norma pendidikan untuk membangun pendidikan yang demokratis. Pendidikan nasional hendaknya dapat menetapkan model pendidikan demokratis yang mampu menanggapi keinginan, cita-cita, kebutuhan dan kebebasan warganegara Indonesia dengan kodrat keinsaniannya. Maka, di

---

<sup>56</sup> Darmaningtyas, *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis Evaluasi Pendidikan di Masa Kritis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 160

tengah suasana demokratis dalam suatu kegiatan pendidikan, seseorang bisa berbincang-bincang bersama untuk mengemukakan harapan serta keinginan masing-masing, dan memecahkan masalah bersama. Demokrasi sebagai prinsip pendidikan perlu senantiasa dikembangkan dalam paradigma pendidikan nasional. Dengan sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, sistem pendidikan nasional harus selalu siap menerima masukan-masukan untuk mengorganisir kembali materi pengajaran, metode mengajar, dan sistem administrasinya. Selain itu, pendidikan nasional harus menciptakan relasi yang akrab antara guru-guru (para pendidik) dengan murid-murid dan masyarakat luas. Pendidikan nasional tidak boleh terpisah dari masyarakat sekitarnya; sebab sekolah yang terisolir dari masyarakat, juga pengetahuan yang terisolir dari perkembangan masyarakat, pasti tidak dapat bertahan lama dalam demokrasi, dan tidak berguna bagi kehidupan manusia.

Sekolah harus bisa memberikan banyak informasi kepada anak-anak. Selain itu, sekolah juga harus mengupayakan pembentukan pola tingkah laku tanpa melalui indoktrinasi, pengerdilan dan paksaan, tetapi harus melalui refleksi, penalaran kritis, dan praktik di tengah kehidupan nyata, dalam iklim bebas dan demokratis. Bentuk-bentuk pendidikan dan pengajaran yang otoriter, intimidatif, bahkan represif seyogyanya digantikan dengan bentuk-bentuk pendidikan yang lebih demokratis, yang dapat menumbuhkan kemandirian individu, mengembangkan daya kreatif, menumbuhkan dialog terbuka untuk berpikir kritis dan reflektif; menumbuhkan keberanian berpikir positif; dan mendefinisi ulang secara lebih sempurna situasi kondisi lingkungan berdasarkan tanggung jawab moral.<sup>57</sup>

Demokrasi dalam pendidikan hendaknya memberikan peluang keikutsertaan sebanyak mungkin anggota masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin, dalam proses penentuan

---

<sup>57</sup> Kartini, *Op. Cit.*, hlm. 233

masa depan pendidikan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pendidikan nasional merupakan tugas yang mesti diemban negara secara legal. Negara bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan dan memberikan supervisi dalam upaya mencerdaskan rakyat secara adil dan merata. Namun, karena luasnya wilayah tanah air serta terbatasnya kemampuan administratif dan keuangan negara, maka pendidikan tidak mungkin diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, jadi harus didukung oleh swadaya masyarakat. Seluruh *stakeholders* pendidikan didorong untuk terlibat dan berpartisipasi kegiatan pendidikan, demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan mendasar yang dialami oleh dunia pendidikan pada umumnya, dan khususnya dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia adalah terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh sikap masyarakat yang pasif, atau mungkin juga karena sistem pendidikan nasional tidak cukup memberi peluang keterlibatan masyarakat. Padahal, kontribusi masyarakat sebagai domain tumbuhnya sekolah-sekolah merupakan faktor determinan dalam pengembangan sistem pendidikan nasional. Semakin dekat dan semakin tinggi keterlibatan masyarakat terhadap pengembangan pendidikan nasional, maka semakin efektif penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional harus dapat mengembangkan wawasan partisipasi sosial (*social participation*) bagi pengembangan kualitas sistem pendidikan nasional. Partisipasi sosial memungkinkan sistem pendidikan nasional dan masyarakat menjalin hubungan harmonis yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dalam upaya untuk mengoptimalkan partisipasi sosial, harus dikembangkan formulasi kegiatan yang bertumpu pada prinsip-



prinsip mengutamakan kesetaraan dan etika; mengutamakan keterbukaan dan kejujuran; memberikan manfaat timbal balik; dan pemberdayaan (penguatan) keterlibatan masyarakat. Pada dasarnya, pengembangan partisipasi sosial bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterlibatan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Apresiasi masyarakat terhadap dunia pendidikan saat ini dapat dikatakan masih relatif baik. Kendati demikian, keterlibatan langsung masyarakat terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Keterlibatan mereka lebih bersifat formalistik dan pasif. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan optimal untuk menggalang partisipasi masyarakat di dalam dunia pendidikan, di antaranya melalui optimalisasi keterlibatan dewan sekolah sebagai perwujudan partisipasi masyarakat yang seyogyanya merepresentasikan kebutuhan masyarakat pengguna pendidikan.

Dengan begitu, usaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dan krisis-krisis pendidikan itu tidak hanya ditimpakan pada daya pikul ekonomis pemerintah dan kebijaksanaan para politisi serta pakar-pakar pendidikan saja, tetapi juga harus disangga oleh daya pikul dan partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tersebut menyertakan pula beberapa pertimbangan di bawah ini:

1. Perubahan posisi, peranan, dan status sosial dari semua subjek yang langsung terlibat dalam aktivitas pendidikan.
2. Perubahan kebijakan pendidikan, baik dalam pengurusan maupun dalam operasionalisasinya, serta penambahan budget pendidikan.
3. Perubahan metode pengajaran, cara mendidik, didaktik, manajemen sekolah-sekolah yang beraneka ragam; juga materi pelajaran yang relevan dengan kebutuhan hidup setiap hari, serta selaras dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

4. Partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam aktivitas edukatif, termasuk masyarakat setempat (sesuai dengan hak formal dan kompetensi masing-masing).<sup>58</sup>

Sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna adanya keadilan dalam hubungan keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Artinya, seluruh manusia memiliki kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, dan setiap orang harus diperlakukan sama dan bisa mendapatkan hak-haknya secara adil. Refleksi paradigma yang dapat dikembangkan bagi pendidikan nasional di antaranya adalah agar kita berupaya meniadakan dan mengurangi sebanyak mungkin kesenjangan-kesenjangan sosial yang terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Diakui saat ini pendidikan nasional kita belum sepenuhnya berhasil meminimalisir kesenjangan-kesenjangan tersebut, bahkan cenderung ikut serta di dalamnya. Pendidikan di Indonesia selain dinilai mempunyai sumbangan yang besar atas tingginya angka pengangguran terdidik, juga mempunyai kontribusi yang besar dalam menciptakan *disparitas* antara si kaya dan si miskin, pandai-bodoh, kota-desa. Hal itu disebabkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan cenderung memihak kepada si kaya.<sup>59</sup>

Oleh karenanya, pendidikan nasional harus mendorong terbukanya kemungkinan tumbuhnya tanggung jawab susila dan sosial terhadap sesama manusia, masyarakat dan bangsa. Pendidikan nasional seyogyanya memberi peluang pengembangan pendidikan masyarakat seluas-luasnya dan seadil-adilnya untuk mengembangkan manusia Indonesia.

---

<sup>58</sup> Kartini, *Op. Cit.*, hlm. 242

<sup>59</sup> Darmaningtyas, *Op. Cit.*, hlm. 141

## PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

*... Pendidikan karakter harus dikembangkan  
di semua jalur dan satuan pendidikan, di sekolah, di keluarga  
dan juga di lingkungan..*

Seperti yang telah dibahas terdahulu bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari jalur keluarga dan lingkungan sebagai tempat untuk mengaplikasikan nilai-nilai pendidikan yang didapatkannya di sekolah. Sekolah adalah tempat yang dijadikan sebagai proses perkembangan social-emosi peserta didik. Sekolah juga disebut tempat yang sangat strategis untuk pendidikan karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam pendidikan di sekolah.<sup>60</sup>

Sebuah pendidikan yang berhasil adalah yang dapat membentuk manusia-manusia berkarakter yang sangat diperlukan dalam mewujudkan sebuah Negara kebangsaan yang terhormat. Pendidikan karakter di sekolah hendaknya dimulai dari usia kanak-kanak. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan selanjutnya, pendidikan karakter harus juga dilanjutkan sampai tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya penerapan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dapat dilakukan dan dikembangkan dengan tiga model pembelajaran, diantaranya.

---

<sup>60</sup> Ratna megawangi. 2004. Pendidikan Karakter. BP MIGAS. 78

### 1. Pembelajaran di Kelas

Pada proses pembelajaran di kelas, pendidikan karakter ditanamkan dengan menggunakan metode terintegrasi pada mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan pada kelas tersebut.

Berikut adalah contoh karakter yang dikembangkan pada satuan mata pelajaran yang diajarkan di kelas.

No	Bidang Studi	Karakter yang dikembangkan
1.	PKn	Cinta tanah air,/pratiotisme,kedisiplinan, taat terhadap hokum, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, demokrasi.
2.	Keagamaan	Empati, simpati, saling menghargai, jujur, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, saling menolong
3.	Matematika	Berfikir sistimatis, berfikir kreatif, berfikir logis, penalaran istilah.
4.	Bahasa Indonesia	Berbahasa yang baku, berbahasa yang santun, membiasakan didalam menulis, gemar membaca.
5.	Sains	Kreativitas, menjaga alam sekitar, sadar akan kebersihan lingkungan, mandiri, rasa ingin tau, memahami bahan kimia, <i>global warming</i> .
6.	PENJAS	Menjaga kebrsihan pribadi, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kesehatan, cinta terhadap olahraga, senang dengan berprestasi.
6.	IPS	Menjaga kerukunan individu, keluarga, dan masyarakat, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, menjadi insan yang jujur,

## 2. Pembelajaran di sekolah

Pada pembelajaran di sekolah pendidikan karakter berdiri suatu aktivitas yang dibiasakan pada lingkungan sekolah. Kurikulumpun dibuat sendiri oleh satuan pendidikan tersebut. Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan fisik dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian .

Berikut adalah contoh pengembangan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dan kakter yang dikembangkan di kelas (lihat lampiran).

## 3. Pembelajaran pada ekstrakurikuler.

Ekstrakurikuler adalah kegiatan sekolah di luar jam pembelajaran, dimana pada kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjadi tambahan dalam perkembangan minat, bakat, dan hal yang diinginkan oleh pesereta didik. Biasanya ekstrakurikuler tidaklah diwajibkan, melainkan siswa dapat memilih kegiatan tersebut sesuai dengan keinginannya.

Akan tetapi ada beberapa ekstrakurikuler yang harus terdapat pada setiap sekolah, salah satunya adalah kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan salah satu yang menjadi program pengembangan karakter. Pada kegiatan kepramukaan adalah pada penanaman nilai-nilai dasa darma pramuka.

Berikut ini adalah contoh pengembangan karakter pada kegiatan kepramukaan yang terkandung didalam dasa darma pramuka.

No	Dasa Darma Pamuka	Karakter yang dikembangkan
1.	Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ketaqwaan, keimanan, keyakinan akan Tuhan, keyakinan beragama
2.	Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia	Sadar akan lingkungan, menjaga kebersihan, saling menyayangi, menghargai.
3.	Pratiot yang sopan dan kesatria	Jiwa patriotism, keberanian, berakhlak baik,
4.	Patuh dan suka bermusyawarah	Taat terhadap aturan, konsisten, teguh hati, demokrasi, menghargai orang lain
5.	Rela menolong dan tabah	Jiwa penolong, jiwa keihklasan
6.	Rajin, terampil, dan gembira	Ulet, tekun, sungguh-sungguh, kreatif, menyenangkan, bersahaja, optimistis, tidak mudah menyerah
7.	Hemat, cermat ,dan bersahaja	Ekonomis, cerdas, epektif, efisien, sosialis.
8.	Berani, disiplin, dan setia	Pemberani, disiplin, istiqomah, konsisten
9.	Bertanggung jawab dan dapat dipercaya	Bertanggung jawab, tidak munafik, jujur, tidak berbohong
10.	Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan	Berfikir yang kritis, sistimatis, baik sangka, tutur kata yang baik, berbicara yang santun, berakhlak baik

## PENUTUP

*... Nilai-nilai Pancasila merefleksikan paradigma pendidikan yang mampu menghadirkan alternatif pendidikan yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupannya...*

Dari seluruh pembahasan tersebut, tampak sekali bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila ternyata masih banyak yang belum direfleksikan dalam pembangunan nasional, pun dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nilai-nilai Pancasila merefleksikan paradigma pendidikan yang apabila dipergunakan sebagai basis pendidikan nasional mampu menghadirkan alternatif pendidikan yang dapat membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Namun demikian, untuk itu semua diperlukan upaya lebih intensif dan seobjektif mungkin menggali serta menilai paradigma yang diketengahkan oleh filsafat Pancasila.

Dalam realitas penyelenggaraan pendidikan nasional, seringkali praktisi pendidikan kehilangan arah paradigmatis dari nilai-nilai Pancasila ini. Bukan saja karena inkonsistensi penyelenggaraan, bahkan seperti halnya menapikan paradigma Pancasila, dan menganggap sepele nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi yang diangkat dari realitas budaya dan rasionalitas masyarakat Indonesia, tentu saja Pancasila bernilai relatif, yang bisa jadi mengindikasikan kekurangan-kekurangan yang bersifat manusiawi. Namun, apresiasi-aktif masyarakat Indonesia pada hasil bangsanya sendiri tentunya diperlukan

sebagai modal bangsa ini untuk membangun kepercayaan diri—yang akhir-akhir ini sepertinya telah sirna—untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Oleh karenanya, mudah-mudahan bagian ini sedikitnya menghadirkan kembali kerinduan kita untuk mengetengahkan sesuatu yang otentik di hadapan bangsa-bangsa lain. Bukankah Pancasila milik kita semua bangsa Indonesia?

Menghadirkan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional tidaklah tepat kalau diartikan dengan mengajarkan Pancasila sebagai mata pelajaran, apalagi dengan pendekatan yang doktrinal-militeristik, tapi yang paling penting adalah merefleksikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya melalui suatu skema konseptual sistem pendidikan nasional. Oleh karenanya, kesadaran semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi syarat mutlak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pendidikan karakter adalah suatu gerakan yang dilakukan oleh suatu bangsa yang bersifat universal pada bangsa tersebut melalui jalur pendidikan yang nantinya diharapkan peserta didik mempunyai karakter yang sesuai dengan yang diinginkan sebagai bukti dari tercapainya tujuan pendidikan di suatu Negara itu sendiri. Pendidikan karakter yang dikembangkan adalah pendidikan karakter yang lebih dapat menjaga dan mengembangkan karakter yang sudah melekat pada Negara tersebut yang nantinya akan menjadi ciri suatu karakter yang khas pada Negara tersebut.

Sementara itu pendidikan karakter dapat dikembangkan menuju karakter yang bersifat Nasional dan karakter yang bersifat global. Hal tersebut semuanya sudah tertuang dalam tujuan pendidikan nasional dan tujuan pengembangan karakter kebangsaan. Untuk mencapai kepada hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan proses intervensi/holistic dan habituasi pada lingkungan pendidikan di sekolah, rumah, dan masyarakat itu tersendiri. Hal tersebut akan membantu proses dalam



pengembangan pendidikan karakter menuju bangsa yang berkarakter baik Nasional maupun global.

Sementara itu pendidikan karakter dapat diterapkan pada satuan pendidikan melalui pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran di sekolah, dan pembelajaran pada program ekstra kurikuler siswa.\*\*\*

Penerbit : **CV. INSAN MANDIRI**  
Jl. Cimuncang No. 14 Padasuka  
Cibeunying Kidul Bandung 40125  
Telp/Fax. 022-7213958  
e-mail: cv.insanmandiri\_14@yahoo.com